

Pengaruh Pengeluaran Agregat Terhadap Pertumbuhan PDRB dan Pengaruh Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier, terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung

Oleh : Achmad Subing

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung)

ABSTRACT

This research was intended for analyzing the effect of Aggregate Expenditure involving consumption, investment, governmental expenditure, and net export on the growth of Gross Regional Domestic Product on unemployment and poverty in Lampung Province. Further, it is intended for analyzing the effect of growth of Gross Regional Domestic Product in the Primary sector, Secondary sector and Tertiary sector on unemployment and Poverty in Lampung Province. The implementation of this research during the period of 2010-2011, including design, implementation and reporting on result of research.

This research apply library study and data was obtained from the Central Bureau of Statistics, Bank Indonesia Regional Research and Development Agency, BAPPEDA and Demography Agency of Lampung Province. Data in the form of aggregate expenditure, economic growth, unemployment and poverty. This research applied the methodology of explanatory research with quantitative analysis technique by applying statistic model of causality through double linear regression analysis and simple linear regression analysis with the significance of five percent.

Result of research indicate that the aggregate expenditure; consumption expenditure investment, governmental expenditure and net export has a simultaneous effect on the growth of PDRB. Partially, the growth PDRB is more positively affected household consumption expenditure, private investment and Governmental expenditure, while net export has negative effect on PDRB. Further, the growth of PDRB has a positive effect on unemployment and poverty which means that PDRB may not minimize Unemployment and Poverty in Lampung Province.

The growth of PDRB in the Primary sector and Tertiary sector partially has a negative effect on unemployment, which means that the unemployment may be minimized by increasing the PDRB in the Primary sector and Tertiary sector. Meanwhile, the PDRB in the Secondary sector has a positive effect on unemployment in Lampung Province.

The growth of PDRB in the Primary sector has a negative effect on poverty, which means that higher the production value of primary sector may minimize in Lampung Province, while the production value of PDRB in the Secondary sector and Tertiary sector has a positive effect on poverty. Nevertheless, simultaneous result of statistic for the growth of PDRB in the Primary, Secondary, and Tertiary sectors is significant on the unemployment and poverty in Lampung Province.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses pengadaan yang semula tidak ada menjadi ada atau yang kurang baik menjadi baik, memelihara dan memperbaiki unsur - unsur pembangunan yang berlangsung dalam Jangka panjang. Karena itu pembangunan memerlukan tujuan dan sasaran, sehingga tujuan akhir dapat tercapai dengan baik. Perubahan tingkah laku ini

sudah lama disadari oleh para penduduk, tetapi tidak mudah untuk mencapainya.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dengan proses mana pendapatan riil perkapita suatu negara bertambah selama priode panjang (Meier, 1995, h. 205). Pembangunan dikatakan suatu proses karena pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang momentum atau perbuatan yang selesai hanya sekali dalam suatu saat, melainkan pembangunan kegiatan yang terus-

menerus (Jhingan, M.L. 2008, h.5).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu *proses*, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu waktu yang dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output per kapita*. Output perkapita adalah kenaikan output total dibagi jumlah penduduk (Boediono, 1999, h. 1).

Selama ini pertumbuhan ekonomi di jadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi (Jhingan, M.L., 2008, h.5).

Dikatakan sebagai tolok ukur, karena beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti; Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor dan Impor berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk setiap tahun akan menambah jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan Penduduk dan bertambahnya angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi.

Bertambahnya angkatan kerja berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik akan menjadi lebih besar pula. Selanjutnya konsumsi, investasi, pengeluaran Pemerintah, ekspor dan impor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung kepada banyak faktor, seperti salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri yang dapat mengenali dan mengidentifikasi secara tepat, guna menghindari faktor tersebut dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari perkembangan nilai indikator-indikator ekonomi makro regional, seperti perkembangan output (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan tingkat bunga, investasi, ekspor-impor, perubahan struktur ekonomi dan

perkembangan tingkat distribusi pendapatan.

Dalam pembangunan ekonomi, kemampuan masing-masing daerah dalam mencapai kinerja perekonomiannya akan berbeda, tergantung pada kondisi sosial budaya, teknologi, politik, maupun kondisi sumber daya. Di sisi lain kondisi perekonomian daerah bersifat dinamis, atau akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Berbagai perubahan dan fenomena yang terjadi harus mampu dikuasai oleh aparatur pemerintah khususnya aparatur perencana. Penguasaan tersebut tidak hanya dari sisi data dan informasi, tetapi juga dari substansi permasalahannya.

PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi. Akan tetapi pada periode yang sama sebahagian di antaranya ada yang digunakan sebagai bahan baku (*input antara*) oleh unit kegiatan ekonomi lain untuk menghasilkan barang dan jasa jenis lainnya. Oleh karenanya dari sudut pandang *pengeluaran* atau *penggunaan*, PDRB merupakan *nilai barang dan jasa akhir* yang digunakan oleh *para pelaku ekonomi domestik* untuk *kegiatan konsumsi, investasi, dan kegiatan ekspor*.

Berdasarkan konsepsi tersebut, PDRB didefinisikan sebagai *nilai tambah bruto* yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, atau merupakan *nilai barang dan jasa akhir* yang digunakan oleh seluruh pelaku ekonomi domestik untuk kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Dari uraian itu dapat dipahami bahwa data PDRB menggambarkan *kemampuan wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa* dalam kurun waktu tertentu. Secara teoritis, pada tingkatan tertentu nilai tersebut juga mencerminkan besarnya nilai tambah atau *pendapatan masyarakat* secara keseluruhan (BPS Lampung, 2009, h. 5).

Provinsi Lampung yang terletak diujung sebelah tenggara pulau Sumatera memiliki sepuluh Kabupaten/Kota. Dalam Pembangunan ekonomi merupakan bagian integral dari perekonomian nasional Indonesia, demikian pula digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung adalah Statistik Pendapatan Regional atau yang lebih dikenal dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Provinsi

Lampung. Selain sebagai alat mengukur pertumbuhan ekonomi, PDRB juga dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan untuk menyusun kebijaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai mana halnya perhitungan pendapatan nasional (PDB) yang dihitung dengan tiga metode (pendekatan); 1) pendekatan Pengeluaran. 2) pendekatan Produksi. 3) pendekatan Pendapatan (Sadono Sukirno, 2002, h. 32), maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung juga dihitung dengan tiga pendekatan:

- a. Pendekatan *Produksi (Product Approach)*; PDRB merupakan selisih antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan usaha, dengan biaya antara untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Berbagai unit kegiatan usaha sesuai dengan karakteristik barang dan jasa yang dihasilkannya, masing-masing dapat dikelompokkan ke dalam (9) sembilan lapangan usaha atau sektor ekonomi yaitu;
 1. Sektor Pertanian
 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
 3. Sektor Industri Pengolahan
 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
 5. Sektor Konstruksi
 6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
 7. Sektor Transportasi dan Komunikasi
 8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
 9. Sektor Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan Pemerintah
- b. Pendekatan *Pendapatan (Income Approach)*; PDRB merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang ikut serta di dalam proses produksi. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud dalam bentuk balas jasa tenaga kerja (upah/gaji), sewa lahan, bunga modal, dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Jika komponen balas jasa ini ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung neto, maka akan menjadi suatu besaran yang disebut dengan Nilai Tambah Bruto (NTB).
- c. Pendekatan *Pengeluaran (Expenditure Approach)*, PDRB merupakan nilai barang

dan jasa akhir yang digunakan oleh unit-unit kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, dan ekspor.

Komponen PDRB menurut penggunaannya terdiri dari;

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
3. Pengeluaran konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Perubahan Stok
6. Ekspor Neto (ekspor - impor).

Secara teoritis perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan disajikan dalam bentuk data PDRB Menurut Lapangan Usaha, sedangkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk PDRB menurut penggunaan. (BPS 2009)

Selanjutnya menurut System of National Accounts (SNA) yang diterbitkan oleh United Nation, secara makro perekonomian suatu wilayah menurut lapangan usaha terdiri dari tiga sektor utama, yaitu; sektor *Primer*, sektor *Sekunder* dan sektor *Tersier*. Secara rinci sektor-sektor tersebut sebagai berikut:

- a. Sektor *Primer*, terdiri dari; sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian
 - b. Sektor *Sekunder*, terdiri dari; sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan air minum, sektor Bangunan dan Konstruksi.
- Sektor *Tersier*, terdiri dari; sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel, sektor Pengangkutan (transportasi) dan komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan, sektor Jasa.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang merupakan indikator perubahan kinerja ekonomi wilayah, selama kurun waktu 2004-2008 pertumbuhan ekonomi berfluktuasi pada kisaran 4,02 sampai dengan 5,94 persen, dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007 (5,94 persen) dan tahun 2008 turun kembali sebesar 5,26 persen yang berarti menurun dari tahun 2007. Jika di hitung tanpa mengikutsertakan sektor pertambangan Migas (non migas) laju pertumbuhan ekonomi lampung sebesar 5,33 persen lebih rendah 0,71 persen dari tahun sebelumnya. Turunnya tingkat pertumbuhan ini menurut BPS Provinsi

Lampung (Terbitan November 2009) sangat dipengaruhi oleh turunnya pertumbuhan di sektor Pertanian (dari 5,52 menjadi 2,99 persen), sektor Industri Pengalihan (dari 6,33 menjadi 5,71 persen), sektor Listrik, Gas, Air bersih (dari 10,18 menjadi 1,84 persen), sektor Bangunan (dari 5,32 menjadi 4,68 persen).

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha meliputi sektor Primer menurut BPS selama tahun 2000-2009 rata-rata tumbuh sebesar 14,36 persen pertahun, PDRB sektor sekunder tumbuh rata-rata 25,07 persen pertahun dan pertumbuhan PDRB sektor sekunder rata-rata 17,93 persen pertahun.

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Lampung (BI. 2009) Pendapatan Regional Provinsi Lampung (PDRB) pada tahun 2008 sebahagian besar digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga, yaitu sebesar 54,88 persen atau laju pertumbuhan sebesar 1,41 persen yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,78 persen. Hal ini berarti 14,75 persen PDRB pada tahun 2008 berasal dari pengeluaran konsumsi rumahtangga dan 85,25 persen berasal dari komponen PDRB lainnya.

Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba merupakan komponen yang memberikan kontribusi terkecil pada PDRB Provinsi Lampung, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2004-2008) pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba rata-rata di bawah dua persen pertahun yang hanya menyumbang sebesar 1,17 persen terhadap PDRB pada tahun 2008. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan perhatian masyarakat terhadap keberadaannya merupakan salah satu faktor penyebab belum berkembangnya lembaga ini di Provinsi Lampung.

Salah satu yang mendorong kemajuan ekonomi di Provinsi Lampung adalah komponen konsumsi Pemerintah, karena konsumsi Pemerintah diutamakan untuk menggerakkan sektor konstruksi dan sektor jasa serta kegiatan yang dapat merangsang kegiatan investasi dan ekspor. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp. 9.855,5 milyar dan memberikan kontribusi sebesar 13,23 persen kepada PDRB.

Salah satu variabel yang cukup penting dalam upaya mengembangkan ekonomi regional

adalah investasi. Besarnya kegiatan investasi tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Jika komponen PMTDB dihubungkan dengan output perekonomian secara keseluruhan, akan diperoleh ukuran yang disebut dengan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*.

Dalam kurun waktu 2004-2008 PMTDB Lampung naik dari Rp 5.807,6 milyar di tahun 2004 menjadi Rp 13.548,7 milyar di tahun 2008. Jika didasarkan data konstan 2000 besaran ini naik dari Rp 4.453,3 milyar di tahun 2004 menjadi Rp. 5.554,5 milyar di tahun 2008. Dengan demikian rata-rata laju pertumbuhan 3,98 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2005 (10,24 %), dan terendah tahun 2004 (-2,98%).

Komponen lain dari perkembangan ekonomi Provinsi Lampung adalah ekspor dan impor. Nilai ekspor Lampung tahun 2004 sebesar Rp 12.836,4 milyar, naik menjadi Rp 40.402,4 milyar di tahun 2008. Demikian halnya dengan nilai impornya; naik dari Rp 10.877,9 milyar menjadi Rp 21.454,3 milyar.

Dalam kurun waktu 2004-2008 pola pertumbuhan ekspor dan impor berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,3 persen (ekspor), dan 7,3 persen (impor) per tahun. Laju pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi di tahun 2008 (50,38 persen) dan laju pertumbuhan impor tertinggi terjadi di tahun 2008 (37,54 persen). Sedangkan laju pertumbuhan ekspor dan impor terendah terjadi di tahun 2004. Kontribusi komponen ekspor terhadap PDRB (2004-2008) rata-rata sebesar 42,10 persen per tahun, sedangkan impor 32,09 persen per tahun. Kontribusi tertinggi untuk ekspor terjadi di tahun 2008 (54,24 persen), dan kontribusi impor tertinggi juga terjadi di tahun 2008 (46,06 persen). Sedangkan kontribusi ekspor terendah terjadi di tahun 2004 (35,64 persen), dan kontribusi impor terendah juga terjadi di tahun 2004 (25,66 persen).

Masalah kependudukan di Provinsi Lampung yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Berdasarkan hasil estimasi Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Lampung (Lampung Dalam Angka 2009) dari data penduduk tahun 2008, penduduk Provinsi Lampung tahun 2008 mencapai 7.391.128 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,08. Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tampak masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Dibandingkan dengan kabupaten, kepadatan penduduk di kota umumnya sangat tinggi.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung misalnya mencapai 4.265 jiwa per kilometer persegi dan Kota Metro mencapai 2.171 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten masih berada dibawah 500 jiwa per kilometer persegi, Kabupaten Lampung Barat baru 80 per KM².

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam penyajian data ketenagakerjaan, BPS menggunakan batasan umur 15 tahun ke atas dari semua penduduk dan dikenal dengan istilah penduduk *usia kerja*.

Penduduk usia kerja di Provinsi Lampung

(tahun 2008) berjumlah 5.248.338 jiwa yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 3.568.770 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 1.679.568 jiwa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (3.313.553 jiwa) dan pengangguran (255.217 jiwa), sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah sekolah (408.811 jiwa), mengurus rumah tangga (1.061.810), lainnya (208.974 jiwa).

Penduduk Provinsi Lampung sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu 55,51 persen atau sebesar 1.839.501 jiwa dengan *value added* pada sektor di sektor ini yang relative rendah, sementara jumlah penduduk yang banyak maka kemiskinan sangat sulit untuk diatasi (Ramudi Arifin, 2013). Adapun penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan tercatat sebesar 9,36 persen atau sebanyak 310.189 jiwa, termasuk pegawai dan calon pegawai Negeri Sipil.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Lampung dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (2000-2009) seperti yang terlihat dalam tabel berikut;

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2000-2009

Tahun	TPT Lampung	Pertumbuhan (%)	TPT Indonesia	Pertumbuhan (%)
2000	191.582	-	5.813.231	-
2001	244.276	27.51	8.005.031	37.70
2002	275.253	12.68	9.132.104	14.08
2003	307.130	11.58	9.531.090	4.37
2004	249.690	-18.70	10.251.351	7.56
2005	286.891	14.89	10.854.254	5.88
2006	307.689	7.25	10.932.000	0.72
2007	269.132	-12.53	10.024.610	-8.30
2008	255.217	-5.17	10.265.243	1.16
2009	239.980	-5.97	10.013.664	-0.32
Rata-rata		3,50		6,98

Sumber : BPS (2010)

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung selama tahun 2000-2009 rata-rata meningkat sebesar 3,50 persen pertahun, peningkatan ini ternyata cukup tinggi, sementara dari rata-rata peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia yang sebesar

6,98 persen pertahun. Dengan demikian peningkatan TPT Indonesia yang rata-rata sebesar 6,98 persen di sumbang oleh TPT Provinsi Lampung sebesar rata-rata 3,50 persen.

Menurut BPS (2010) TPT Provinsi Lampung tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung dan

Kota Metro, yaitu masing-masing sebesar 13,14 persen dan 12,01 persen. Sedangkan yang terkecil terjadi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah, masing-masing sebesar 2,97 persen, 3,91 persen, dan 4,89 persen.

Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, perkembangan penduduk Provinsi Lampung berpengaruh pada perkembangan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif (*Dependency Ratio*).

Menurut data BPS tingkat *dependency ratio* di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi, dimana *dependency ratio* rata-rata 57,98% per tahun (tahun 2000-2009), hal ini menunjukkan bahwa

ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk yang produktif cukup tinggi atau setiap 100 usia produktif beban menanggung penduduk usia tidak produktif rata-rata 58 orang.

Berdasarkan *dependency ratio* yang diungkapkan di atas, mempunyai arti bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera diatasi. Sebab, jika persoalan penciptaan kerja ini tidak ditangani dengan seksama, maka dikhawatirkan akan memunculkan dampak lanjutan, yang imbasnya menjadi lebih sulit untuk diprediksikan.

Penduduk miskin perkembangannya relatif tinggi jika di dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Indonesia selama sembilan tahun terakhir (tahun 2000-2009) seperti yang terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Penduduk Miskin Indonesia tahun 2003-2009

Tahun	Penduduk Miskin Prov. Lampung (000)	Perkembangan (%)	Penduduk Miskin Indonesia (000)	Perkembangan (%)
2000	2.018	-	3.870,8	-
2001	1.674	-17,05	3.792,3	-2,03
2002	1.651	-1,37	3.841,6	1,30
2003	1.568	5,03	4.898,8	5,28
2004	1.562	-0,38	5.229,8	6,76
2005	1.573	0,70	5.137,6	-1,76
2006	1.638	4,13	5.512,9	7,04
2007	1.662	1,47	5.457,9	-1,01
2008	1.592	-4,21	5.249,6	-3,82
2009	1.558	-1,14	4.752,5	-9,56
Rata-rata		-1,42		-0,54

Sumber ; BPS (2010)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung selama periode 2000-2009 perkembangannya menurun rata-rata -1,42 persen pertahun, sedangkan perkembangan jumlah penduduk miskin Indonesia rata-rata -0,54 persen pertahun. Penurunan jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2000-2009 menurut BPS masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Lampung yang meningkat rata-rata 1,21 persen pertahun dan masih cukup kecil penurunannya bila di bandingkan penurunannya jumlah penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menurut Bank Indonesia (triwulan II, 2009) pada Maret 2009 mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2009 tercatat 1,55 juta atau turun 2,09% dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Demikian pula bila dibandingkan dengan total jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 juga mengalami penurunan dibandingkan posisi Maret 2008, yaitu dari 20,98% menjadi 20,22%.

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya penting untuk mengkaji pengaruh pengeluaran

agregat yang memicu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung dan pengaruh pertumbuhan sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung. Untuk itu penelitian ini mengambil thema sentral sebagai berikut;

“Bagaimanakah pengaruh pengeluaran agregat seperti; Konsumsi Rumahtangga, Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor Netto terhadap pertumbuhan PDRB dan pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran dan kemiskinan serta Pengaruh pertumbuhan sektor Primer, sektor Sekunder, dan sektor Tersier terhadap Pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung”

Kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian ini didasarkan pada data periode runtut waktu (*time Series*) selama 35 tahun, yaitu tahun 1975 - 2009.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Agregat yaitu; Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga, Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor Netto secara Simultan (bersama-sama) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung.
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Agregat yaitu; Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga, Investasi swasta, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor Netto secara parsial (masing-masing variabel) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung.
3. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.
4. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
5. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara simultan (bersama-sama) terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.
6. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara parsial (masing-masing variabel) terhadap pengangguran di

Provinsi Lampung.

7. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara simultan (secara bersama-sama) terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.
8. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara parsial (masing-masing variabel) terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Tujuan penelitian ini didasarkan pada tujuan menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengestimasi pengaruh variable-variabel yang diuraikan pada perumusan masalah di atas.

Sementara itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya tentang pengeluaran agregat, seperti konsumsi rumahtangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor netto yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung dan pengaruh PDRB terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung.
2. Sebagai bahan acuan para peneliti lain untuk meneliti dan mengembangkan lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung
3. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan khususnya Pemerintah Daerah Lampung guna merumuskan kebijaksanaan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

BAHAN DAN METODE

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2000, h.

144).

Proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara saat ini sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- b. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Menurut Jhingan M.L (2008, h. 67), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 (dua) macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi. Dalam suatu studinya, Bauer dalam Jhingan M.L (2008, h. 67), menunjukkan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan.

Sedangkan menurut Irawan dan Suparmoko (2002, h. 433), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi nasional secara fisik atau dalam istilah umum adalah peningkatan Produk Nasional Bruto dan lebih tepat lagi yaitu Produk Nasional Neto. Produk Nasional Neto adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam waktu satu tahun, setelah dikurangi dengan penyusutan. Untuk sampai pada nilai pendapatan nasional, nilai Produk Nasional Neto tersebut harus dikurangi lagi dengan pajak tidak langsung.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan

dari produk per kapita. Dapat juga dikatakan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa di suatu negara atau pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan output dari waktu ke waktu.

Menurut Soemitro Djohadikusumo (1994), pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, perubahan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi yang menurut Soemitro Djohadikusumo (1994, h. 55) dijelaskan tentang tiga ciri pokok pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita dalam arti nyata (riil).
- b. Persebaran (distribusi) angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
- c. Pola persebaran penduduk.

Laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, perubahan investasi dan perubahan pengeluaran pemerintah (investasi oleh pemerintah). Pendapatan dan atau pengeluaran nasional (Y) ditentukan oleh tingkat Demand Aggregate (Z), dimana $Z = C + I + G$ atau $Y = C + I + G$.

Menurut Boediono (2005, h. 36), permintaan agregat (*aggregate demand*) atau (dalam perekonomian tertutup) sama saja dengan pengeluaran agregat (*aggregate expenditure*) dari masyarakat secara keseluruhan, yang disebut Z, yaitu terdiri dari tiga unsur : (a) permintaan efektif dari rumah tangga akan barang-barang konsumsi (disebut C), (b) permintaan efektif dari sektor produsen untuk investasi (disebut I) dan (c) permintaan efektif dari pemerintah (G),

$$Z = C + I + G$$

Proses produksi menghasilkan pendapatan dalam masyarakat (yaitu bagi sektor rumah tangga). Selanjutnya pendapatan menimbulkan permintaan efektif dalam pasar barang, yakni permintaan efektif untuk barang-barang konsumsi oleh sektor rumah tangga C. Bentuk fungsi konsumsi yang paling sederhana adalah

$$C = a + cY,$$

dimana a menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi minimal. Investasi (I) adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) guna pembelian barang-barang/jasa untuk tujuan

investasi, yaitu untuk penambahan stok di gudang atau untuk perluasan pabrik. Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah. Yang dimaksudkan dalam G hanyalah pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang merupakan produksi tahun yang bersangkutan.

Dalam perekonomian terbuka menurut Boediono (2005, h. 136), permintaan agregat (Z), Z diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang/jasa yang diproduksi di dalam negeri, hal ini berarti bahwa dalam Z harus:

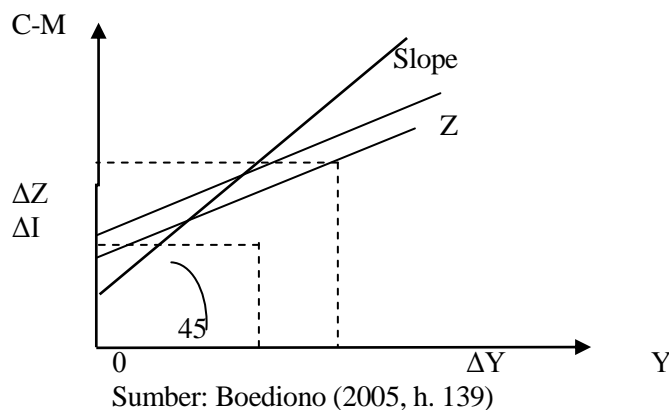
- Memasukkan permintaan orang-orang luar negeri akan barang atau jasa yang diproduksi (yang tidak lain daripada ekspor ke luar negeri).
- Mengeluarkan darinya permintaan akan barang/jasa buatan luar negeri (yaitu impor dari luar negeri) karena ini bukan permintaan akan barang/jasa buatan dalam negeri.

Jadi, bagi perekonomian terbuka $Z = C + I +$

$$G + X - M$$

Dimana, X = ekspor barang/jasa ke luar negeri, M = impor barang/jasa dari luar negeri

Perbedaan antara Z untuk perekonomian terbuka dan Z untuk perekonomian tertutup terletak pada penggunaan perhitungan ekspor (X) dan impor (M). Pada perekonomian tertutup Z hanya ditentukan oleh pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi dan pengeluaran pemerintah, sedangkan pada perekonomian terbuka penentuan Z selain dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi dan pengeluaran pemerintah juga ditambahkan ($X - M$) yang dikenal dengan neraca perdagangan. M harus dikurangkan karena di dalam unsur pengeluaran lain (C, I dan G) termasuk pengeluaran untuk barang-barang impor, dan sesuai dengan pengertian mengenai permintaan agregat di atas, harus dikeluarkan dari Z . Gambaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 1. Perekonomian Terbuka

Konsumsi

Menurut Case and Fair (2004, h. 71), pada masing-masing periode (minggu, bulan, tahun, dan lain-lain), rumah tangga menerima sejumlah pendapatan agregat (Y). Dalam kondisi perekonomian tertutup, rumah tangga hanya dapat melakukan dua hal terhadap pendapatannya, yaitu; rumah tangga dapat membeli barang dan jasa yakni dapat mengkonsumsinya atau menabungnya.

Dalam periode tertentu, jumlah konsumsi agregat dalam perekonomian tergantung pada

sejumlah faktor, termasuk :

- Pendapatan rumah tangga
- Kekayaan rumah tangga
- Tingkat suku bunga
- Harapan rumah tangga tentang masa depan.

Faktor-faktor tersebut bekerja bersama-sama menentukan perilaku pengeluaran dan tabungan rumah tangga, baik secara individual maupun secara agregat. Rumah tangga yang pendapatan dan kekayaan lebih tinggi cenderung mengeluarkan lebih banyak dibanding rumah tangga yang pendapatan dan kekayaannya

lebih sedikit. Tingkat suku bunga yang lebih rendah menurunkan biaya pinjaman dengan demikian tingkat suku bunga yang lebih rendah cenderung mendorong pengeluaran. (Tingkat suku bunga yang lebih tinggi menaikkan biaya peminjaman dan cenderung menurunkan pengeluaran). Akhirnya, harapan positif tentang masa depan mungkin meningkatkan pengeluaran saat ini, sementara ketidakpastian tentang masa depan cenderung mengurangi pengeluaran saat ini.

Hubungan antara konsumsi dan pendapatan disebut fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi rumah tangga individual menunjukkan tingkat konsumsi pada masing-masing tingkat pendapatan rumah tangga. Fungsi konsumsi agregat merupakan garis lurus dengan persamaan sebagai berikut:

$$C = a + bY$$

Y adalah keluaran (pendapatan) agregat, C adalah konsumsi agregat, dan a adalah titik dimana fungsi konsumsi memotong sumbu C konstan. Huruf b adalah slope garis dalam kasus ini $\Delta C/\Delta Y$, karena konsumsi (C) diukur pada sumbu vertikal, pendapatan (Y) diukur pada sumbu horizontal. Setiap kali pendapatan naik (katakanlah sebesar ΔY), konsumsi meningkat b kali ΔY . Dengan demikian, $\Delta C = b \times \Delta Y$ dan $\Delta C/\Delta Y = b$.

Kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi (MPC) adalah angka pecahan yang menyatakan besarnya kenaikan pendapatan yang dikonsumsi (atau angka pecahan yang menyatakan besarnya penurunan pendapatan untuk konsumsi). Kecenderungan marginal untuk menghemat atau menabung (MPS) adalah angka pecahan yang menyatakan besarnya kenaikan pendapatan yang dihemat (atau angka pecahan yang menyatakan besarnya penurunan pendapatan yang keluar dari tabungan).

Karena C adalah konsumsi agregat dan Y adalah pendapatan agregat, maka MPC adalah kecenderungan marginal yang ada di masyarakat untuk konsumsi dari besarnya pendapatan nasional.

Investasi

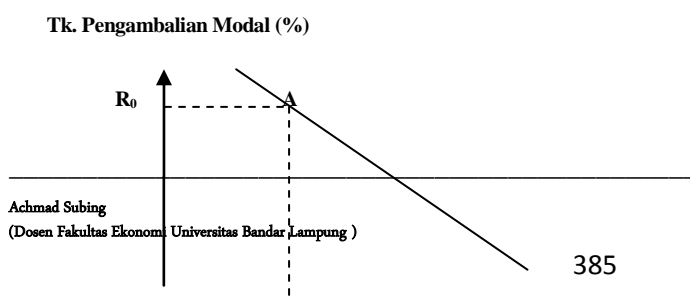
Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Menurut Abdul Halim (2005, h. 4), Umumnya investasi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : investasi pada aset-aset finansial (financial assets) dan investasi pada aset-aset riil (real assets). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lain-lain.

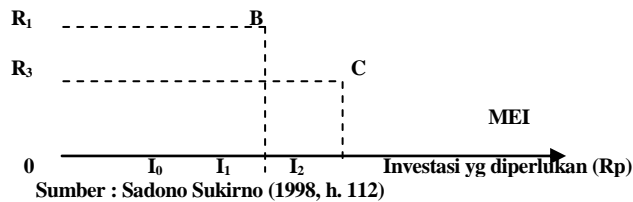
Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal menurut Sadono Sukirno (1998, h. 106), merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa .

Efisiensi modal marjinal dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan diantara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang diinvestasikan. Gambar 2.2. merupakan satu contoh dari kurva efisiensi modal marjinal (MEI).

Pada kurva MEI ditunjukkan 3 (tiga) buah titik : A, B dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat pengembalian modal adalah R_0 dan investasi adalah I_0 . Ini berarti titik A menggambarkan bahwa dalam perekonomian terdapat kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R_0 atau lebih tinggi, dan untuk mewujudkan investasi tersebut modal yang diperlukan adalah sebanyak I_0 . Titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama.





Sumber : Sadono Sukirno (1998, h. 112)

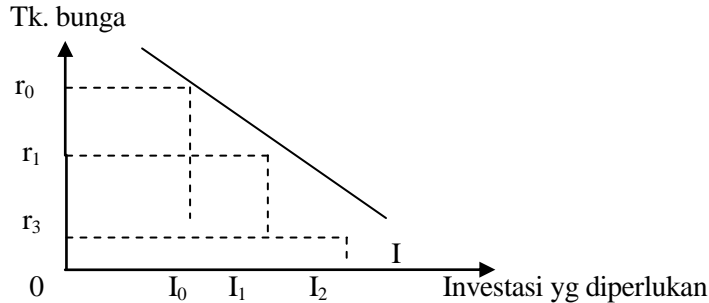
Gambar 2. Efisiensi Modal Marginal

Titik B menggambarkan wujudnya kesempatan untuk menginvestasikan dengan tingkat pengembalian modal R_1 atau lebih, dan modal yang diperlukan adalah I_1 dan titik C menggambarkan untuk mewujudkan usaha yang menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R_2 atau lebih, diperlukan modal sebanyak I_2 .

Mengetahui MEI saja belumlah cukup, para penanam modal harus pula mempertimbangkan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan, maka rencana perusahaan untuk melakukan investasi akan dibatalkan. Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Untuk menentukan

besarnya investasi yang harus dilakukan perlu menghubungkan kurva MEI dengan tingkat bunga, seperti yang terdapat dalam Gambar berikut.

Pada tingkat bunga sebesar r_0 terdapat investasi bernilai I_0 yang mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak r_0 atau lebih. Maka pada tingkat bunga sebanyak r_0 , investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah I_0 . Apabila tingkat bunga adalah r_1 diperlukan modal sebanyak I_1 untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal r_1 atau lebih. Dengan demikian pada tingkat bunga sebanyak r_3 investasi yang akan dilakukan adalah sebanyak I_1 . Hubungan tingkat bunga dengan Investasi tersebut diatas dapat terlihat pada Gambar

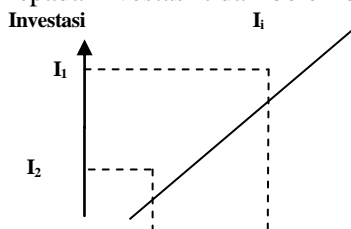


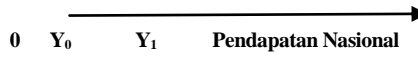
Sumber : Sadono Sukirno (1998, h. 113)

Gambar 3. Tingkat Bunga dan Investasi

Dalam kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapatan nasional pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan para pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Walau bagaimanapun, pengaruh pendapatan nasional kepada investasi tidak boleh diabaikan..

Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Apabila dimisalkan ciri-ciri perkaitan diantara investasi dan pendapatan nasional adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi I_1 dalam Gambar berikut;



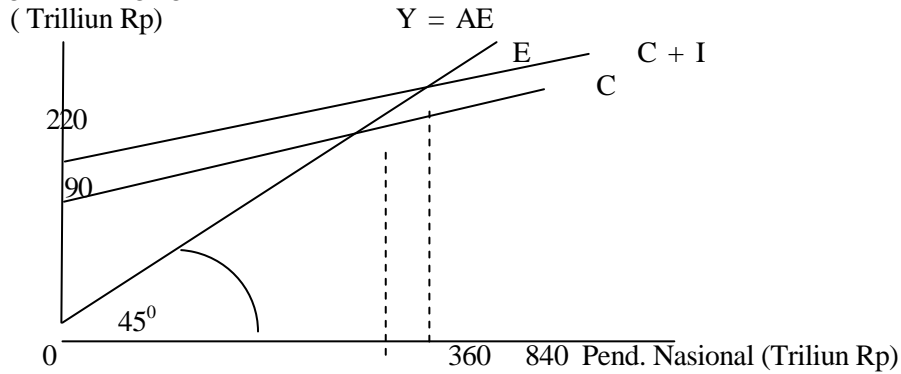


 0 Y_0 Y_1 Pendapatan Nasional
 Sumber: Sadono Sukirno (1998, h.116) **Gambar 4. Investasi Terpengaruh**

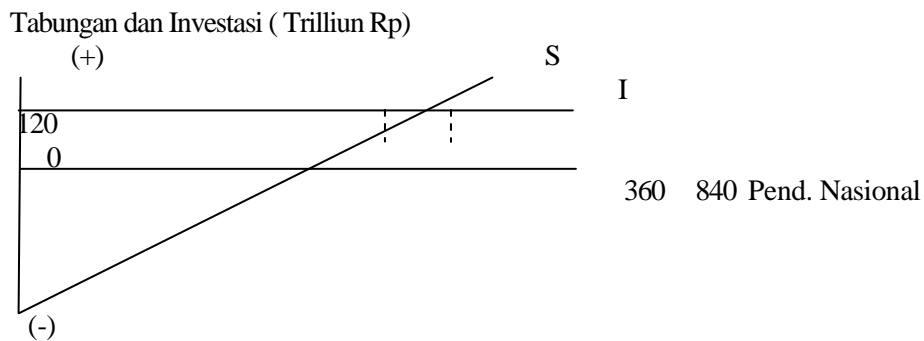
Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi pula tingkat investasi. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan nasional dari Y_0 menjadi Y_1 menyebabkan investasi naik dari I_0 menjadi I_1 . Investasi yang bercorak demikian dinamakan investasi berpengaruh atau *induced investment*.

Selanjutnya dengan pendekatan permintaan dan penawaran Agregat pada Gambar (a), fungsi $C + I$ memotong garis $Y = AE$ dititik E. Titik E, menunjukkan kebutuhan dimana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai dan pendapatan nasional adalah Rp 840 triliun, sebagai mana pada gambar.

Pada gambar diatas, titik E menunjukkan
 Pengeluaran Agregat



(a) Pendekatan Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat



(b) Pendekatan suntikan kebocoran

Sumber : Sadono Sukirno (1998, h. 119)

Gambar 5. Keseimbangan Pendapatan Nasional

Pada waktu pendapatan nasional melebihi nilai ini, fungsi $C + I$ berada di bawah garis $Y = AE$, dan keadaan itu berarti bahwa pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi

keadaan dimana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai dapat dibuktikan dengan memisalkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi berbeda dengan yang ditunjukkan oleh titik E. Misalkan pendapatan nasional adalah Rp 600 triliun. Pada tingkat pendapatan nasional ini fungsi $C + I$ berada di atas garis $Y = AE$. Ini berarti pengeluaran agregat adalah lebih besar daripada pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan meng galakkan para pengusaha menambah produksi mereka, dan pendapatan menjadi bertambah tinggi. Keadaan seperti itu akan terus berlangsung sehingga pendapatan nasional bernilai Rp 840 triliun.

Pada Gambar (b), memperlihatkan fungsi

tabungan rumah tangga dan fungsi investasi para pengusaha. Nilai-nilai investasi dan tabungan ditunjukkan pada sumbu datar. Dengan menggunakan fungsi tabungan dan fungsi investasi juga dapat ditentukan tempat kedudukan dari keseimbangan perekonomian negara. Ini ditentukan oleh titik perpotongan fungsi S dan fungsi I, yaitu pada titik E, hal itu dapat dibuktikan dengan mudah. Telah diketahui bahwa pengeluaran agregat sama dengan konsumsi tambah investasi dan pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah tabungan. Disebelah kiri titik E investasi adalah lebih besar daripada tabungan. Oleh karenanya di sebelah kiri titik E pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional.

Keadaan ini akan menggalakkan peningkatan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional akan menjadi bertambah besar. Disebelah kanan E keadaan yang sebaliknya berlaku, yaitu tabungan lebih besar dari investasi. Ini menyebabkan pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Pertambahan stok barang-barang yang timbul akan mendorong para pengusaha menurunkan kegiatannya. Pada titik E tabungan sama dengan investasi, maka pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Kesamaan ini menyebabkan pengusaha tidak akan menambah atau mengurangi tingkat kegiatan mereka. Dengan demikian tingkat keseimbangan perekonomian negara akan tercapai pada titik E, yaitu pada keadaan dimana investasi sama dengan tabungan.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono Sukirno (1998, h. 151) pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dan pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan

pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor: diantaranya jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan, Seperti:

- a. **Proyeksi jumlah pajak yang diterima**
Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya, makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.
- b. **Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai**
Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi/ mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur, irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan membangun pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka, untuk membiayainya pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.
- c. **Pertimbangan politik dan keamanan**
Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku diberbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.

Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak.

Dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang-barang publik, mengalokasikan barang-barang produksi maupun konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peranan pemerintah ini dianggap penting terutama karena adanya barang-barang umum (public goods), ketidak sempurnaan pasar, persoalan distribusi pendapatan dan upaya menjaga alokasi barang secara efisien dan adil. (Rahman Mulyawan, 2002, h. 4,18).

Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah. Pernyataan ini didukung oleh Adolf Wagner yang mengemukakan suatu hukum yang disebut dengan Law of ever Increasing State Activity (Hukum tentang Selalu Meningkatkan Kegiatan Pemerintah). Berdasarkan penelitiannya di beberapa negara maju, pada abad 19 ternyata bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam arti uang secara riil maupun secara absolut atau relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan nasional (GNP). Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan sosial akibat perkembangan industri.

Berdasarkan sifatnya, pengeluaran pemerintah mempunyai beberapa ciri yaitu:

a. Bersifat exhaustive artinya merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain. Jadi exhaustive expenditure itu berarti mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Secara konkrit exhaustive expenditure ini dapat merupakan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta, misalnya bahan makanan, bangunan, mesin-mesin, atau merupakan pembelian barang atau jasa yang

dihasilkan oleh pemerintah sendiri misalnya jasa guru.

b. Bersifat transfer artinya berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin juga kepada negara-negara lain sebagai hadiah (grants). Jadi transfer payments hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada yang lain, terakhir menentukan penggunaan uang tersebut.

Berdasarkan atas penilaian tersebut maka pengeluaran negara dapat dikategorikan kedalam berbagai jenis, yaitu:

- Pengeluaran yang self-liquidating, artinya pemerintah mendapat pembayaran dari masyarakat yang menerima barang/jasa.
- Pengeluaran yang reproduktif, artinya menimbulkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, misalnya menaikkan tingkat penghasilan masyarakat sehingga penerimaan pemerintah dari sektor pajak meningkat.
- Pengeluaran yang menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga akhirnya melalui jasa-jasa tersebut dapat menaikkan penghasilan nasional, misalnya pembuatan obyek wisata/rekreasi.
- Pemborosan, misalnya perang.
- Penghematan di masa yang akan datang, misalnya pemeliharaan terhadap anak jalanan dan anak yatim piatu.

Ekspor

Menurut Sadono Sukirno (2004, h. 410), dalam usaha untuk menambah produksi dan menambah keuntungan, sebagian perusahaan akan mencoba meluaskan pasarannya ke luar negeri. Maka kegiatan ekspor pada dasarnya merupakan usaha untuk menjual barang yang diproduksi ke pasaran internasional. Penjualan ini biasanya dilakukan kepada perusahaan lain di luar negeri.

Perusahaan yang mengekspor barang dibedakan kepada dua golongan, yaitu perusahaan yang khusus dikembangkan dengan tujuan untuk mengekspor barang yang diproduksinya dan perusahaan yang lebih mengutamakan pasaran dalam negeri tetapi

mengekspor kelebihan produksinya. Dalam perusahaan golongan pertama termasuk perusahaan garmen untuk ekspor dan perusahaan perkebunan karet dan kelapa sawit. Untuk perusahaan seperti ini keadaan pasaran luar negeri sangat menentukan kesuksesan usahanya. Perusahaan yang menghasilkan barang untuk pasaran dalam negeri, kegiatan ekspor merupakan usaha untuk mempercepat perkembangan perusahaan dan menambah keuntungan.

Apabila pasaran dalam negeri sudah jenuh, dan masih terdapat kelebihan kapasitas produksi, kegiatan ekspor akan: (1) menentukan produksi dan meniggikan kapasitas penggunaan mesin, (2) menurunkan biaya produksi per unit, dan (3) meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Salah satu unsur penting yang dapat menjamin kesuksesan usaha mengekspor barang adalah kegiatan pemasaran.

Usaha untuk memasarkan barang ke luar negeri harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menciptakan hubungan dengan pengimpor di luar negeri dan melakukan promosi pemasaran perlu dilakukan dengan serius. Kegiatan ini akan memerlukan biaya yang sangat besar. Akan tetapi, apabila usaha tersebut berhasil, perusahaan akan menikmati keuntungan yang besar dari usaha tersebut. Dan pada waktu yang sama perusahaan telah memberi sumbangan penting kepada perkembangan ekonomi Negara dalam bentuk kenaikan ekspor, penambahan devisa, penambahan pajak, penambahan pendapatan nasional dan penambahan kesempatan kerja.

Kebijakan ekspor menurut Tulus Tambunan (2000, h. 157), bertujuan untuk mendukung perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan ini dapat dicapai dengan berbagai macam kebijakan, mulai dari yang menyangkut perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya, pembebasan, keringanan, atau pengembalian pajak ekspor dan potongan pajak impor dan pajak tidak langsung, penyediaan fasilitas kredit perbankan khusus bagi para eksportir, dalam arti kemudahan akses atau pemberian pinjaman dengan suku bunga yang disubsidi (dibawah tingkat komersial), pembentukan kelembagaan, seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Batam, export processing zone, dan lain-lain. Penyederhanaan administrasi/prosedur/tatalaksana ekspor,

standarisasi/diversifikasi vertikal/horizontal, pemberian subsidi ekspor, pembentukan asosiasi eksportir, melakukan promosi baik di dalam maupun diluar negeri, pembentukan International Trade Promotion Centre (ITPC) di berbagai negara penting tujuan ekspor, seperti Jepang, AS, dan Eropa diantaranya Rotterdam, Belanda, alokasi preferensi dari izin impor, menjadi anggota baik dari asosiasi-asosiasi produsen dunia untuk komoditas-komoditas tertentu, seperti Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) maupun asosiasi-asosiasi produsen dan konsumen dunia, seperti misalnya International Coffee Organization (ICO), Multi Fibre Agreement (MFA), hingga pemanfaatan fasilitas keringanan bea masuk, disebut General System of Preferency (GSP), yang diberikan oleh negara-negara industri maju (OECD) untuk barang-barang manufaktur dari negara-negara sedang berkembang.

Impor

Impor menurut Sadono Sukirno (2004, h. 411), merupakan kegiatan perusahaan yang membeli barang-barang yang diproduksi negara lain. Kegiatan mengimpor barang ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang khusus memperdagangkan barang yang diimpornya. Terdapat pula perusahaan yang menjual berbagai peralatan produksi, barang bangunan, dan berbagai jenis barang konsumsi yang mengimpor barang yang dijualnya dari produsen di luar negeri.

Disamping perusahaan pengimpor, terdapat pula perusahaan yang mengimpor barang yang diperlukannya secara langsung. Ini terutama dilakukan oleh perusahaan yang bersifat industri pengolahan. Waktu didirikan, mengimpor sendiri barang modal yang diperlukannya. Pada saat menjalankan kegiatan produksinya, secara kontinu akan mengimpor bahan mentah yang diperlukan. Impor mesin-mesin pabrik dan peralatannya dan impor bahan mentah merupakan bagian yang cukup penting dari keseluruhan impor yang dilakukan oleh negara-negara berkembang.

Kegiatan mengimpor memberikan efek dan pengaruh yang sebaliknya dari kegiatan mengekspor. Aliran ke luar mata uang asing akan berlaku dan menurunkan devisa yang tersedia. Impor barang konsumsi dapat menyaingi perusahaan dalam negeri dan

menurunkan produksi mereka. Apabila hal ini terjadi, maka produksi, penjualan dan keuntungan perusahaan-perusahaan yang dipengaruhi oleh keberadaan barang impor akan menurun. Dari segi gambaran secara makro, hal tersebut dapat menyebabkan defisit dalam keseimbangan aliran keluar-masuk devisa, menurunkan nilai mata uang domestik dan mengurangi kesempatan kerja.

Kebijakan impor menurut Tulus Tambunan (2000, h. 158), bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap persaingan barang-barang impor. Karena itu, kebijakan impor sering disebut kebijakan proteksi. perdagangan tanpa proteksi (free market) yang sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif akan memaksimalkan output dan kesejahteraan dunia (gains from trade). Artinya, kebijakan impor yang bersifat proteksi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas, pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, tidak hanya negara eksportir tetapi juga negara importir.

Sedangkan menurut Hamdy Hady (2001, h. 65), kebijakan perdagangan internasional di bidang impor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan tariff barrier. Kebaikan tariff barrier dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:
 - a) Pembebasan bea masuk/tarif rendah adalah antara 0-5% dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital seperti, mesin-mesin vital, alat-alat militer/pertahanan/keamanan
 - b) Tarif sedang antara > 5-20% di kenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.
 - c) Tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri.

2. Kebijakan nontariff barrier

Kebijakan nontariff barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar nontariff barrier dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1). Pembatasan spesifik (specific limitation) : Larangan impor secara mutlak, pembatasan impor atas quota system, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kesehatan/karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, perizinan impor atau import licenses, embargo, hambatan pemasaran/marketing.
- 2). Peraturan bea cukai (customs administration rules) : tatalaksana impor tertentu (procedure), penetapan harga pabean (custom value), penetapan forex rate (kurs valas) dan pengawasan devisa (forex control), consulat formalities, packaging/labelling regulation, documentation needed, quality and testing standard, pungutan administrasi (fees), dan tariff classification.
- 3). Government participation : kebijakan pengadaan pemerintah, subsidi dan insentif ekspor, countervailing duties, domestic assistance programs, trade-diverting.
- 4). Import charges : import deposits, supplementary duties dan variable levies.

Pengangguran

Salah satu manifestasi (akibat) utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya (employment) termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif sangat rendah (Todar, 2000, h. 67). Adapun penyebab utamanya ada 2 (dua) hal yaitu:

- a. Pengangguran terselubung (underemployment); artinya orang-orang yang bekerja di bawah kapasitas optimalnya. Ini terlihat dari banyak tenaga kerja di daerah perkotaan maupun pedesaan yang bekerja di bawah jam kerja normal, mereka hanya bekerja secara harian, mingguan atau bahkan

musiman. Pengangguran terselubung atau semi pengangguran tersebut juga meliputi mereka yang bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi produktivitasnya relatif rendah sehingga pengurangan jam kerja tidak akan membawa perubahan/pengaruh terhadap total output.

- b. Pengangguran penuh atau terbuka (open unemployment) adalah orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali.

Munandar (2000, h. 317), juga membedakan 5 (lima) jenis pokok dari penerahan tenaga kerja yang tidak optimal (underutilization of labor) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

Pengangguran terbuka adalah mereka yang benar-benar tidak bekerja, baik secara sukarela (orang-orang yang sebenarnya bisa saja memperoleh suatu pekerjaan permanen, namun atas dasar alasan-alasan tertentu, misalnya karena mereka sudah cukup makmur tanpa bekerja, mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia) maupun karena terpaksa (mereka yang sesungguhnya sangat ingin bekerja secara permanen namun tidak kunjung mendapatkannya). Selama dekade 1960-an dan 1970-an, jenis pengangguran yang pertama, yakni pengangguran sukarela (voluntary unemployment) lebih banyak; mereka sebagian besar adalah lulusan perguruan tinggi yang memang terlalu memilih-milih pekerjaan, atau sekedar ingin menikmati hidup sesuka hatinya sendiri tanpa repot-repot mencari pekerjaan. Namun pada dekade 1980-an dan 1990-an, sebagai akibat dari begitu terbatasnya permintaan tenaga kerja serta rendahnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, maka proporsi pengangguran terpaksa (tidak sukarela) menjadi jauh lebih banyak daripada yang sukarela.

- b. Pengangguran Terselubung (Underemployment) Adalah para pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka inginkan (sebagian besar bekerja hanya secara harian, mingguan, atau musiman). Kategori ini dan kategori nomor 3 (tiga) di bawah merupakan bentuk pengangguran sementara yang paling banyak

dan paling mudah dijumpai di mana saja, khususnya di kalangan negara-negara berkembang. Sebagai contoh, Peru dilaporkan dibebani oleh tingkat pengangguran murni atau terbuka sebesar 15 persen di tahun 1992 ; akan tetapi, jika angka pengangguran terselubung ikut dihitung, maka total penganggurannya mencapai 70 persen.

- c. Mereka yang nampak aktif bekerja tetapi sebenarnya kurang produktif (The Visibly Active But Underutilized). Adalah mereka yang tidak digolongkan dalam pengangguran terbuka atau terselubung, namun bekerja di bawah standar produktivitas optimal. Jenis-jenisnya antara lain :

1) Pengangguran terselubung yang terlindungi (Disguised Underemployment). Banyak orang yang sepiantas lalu nampak bekerja secara penuh sepanjang hari di sektor pertanian atau lembaga-lembaga pemerintahan, namun sebenarnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka tangani tersebut dan tidak memerlukan waktu sampai sepanjang hari. Tekanan-tekanan sosial terhadap sektor industri pemerintah maupun swasta acapkali mengakibatkan adanya pengangguran terselubung itu. Apabila semua pekerjaan yang tersedia selalu digarap secara beramai-ramai, maka orang-orang yang bersangkutan (yakni, yang separuh bekerja separuh menganggur) tidak akan nampak jelas. Akan tetapi, seandainya volume pekerjaan yang ada dibagi secara merata, maka mereka akan segera nampak dari praktek pengangguran terlindungi yang tidak efisien itu akan lebih mudah dilihat.

2) Pengangguran tersembunyi (Hidden Unemployment). Mereka yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang bukan merupakan pilihan utamanya, misalnya menjadi pembantu rumah tangga atau memberi kursus kecil-kecilan. Bidang pekerjaan ini terpaksa mereka ambil karena mereka tidak berhasil mendapatkan mata pencaharian atau profesi lain yang lebih mereka inginkan, atau karena suatu sebab lain, misalnya karena ia wanita sedangkan norma yang berlaku di masyarakatnya ternyata belum bisa menerima seorang wanita yang bekerja secara penuh di luar

rumah. Jadi, tempat-tempat kerja yang sekarang mereka tekuni hanya semacam tempat pelarian. Para mahasiswa yang berlama-lama menyelesaikan kuliahnya juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Karena mereka tidak melihat prospek kerja yang cerah di luar kampus, maka mereka memilih untuk tetap kuliah saja dan tinggal di lingkungan kecil yang indah itu. Dengan tetap bertahan di bangku kuliah, paling tidak mereka dapat mempertahankan status sosial yang cukup terhormat, sekaligus menjadi alasan termasuk menutupi kondisi mereka yang menganggur.

3) Pensiun terlalu dini (Premature Retirement).

Fenomena ini paling mudah dilihat di kalangan pegawai negeri. Di banyak negara, terutama sekali di negara-negara Dunia ketiga, batas usia pensiun seseorang sering diturunkan dengan berbagai alasan, misalnya untuk memberi kenaikan pangkat kepada para pejabat eselon bawah.

- d. Mereka yang memang tidak mampu bekerja secara penuh (the impaired). Mereka ini, misalnya penyandang cacat, sebenarnya ingin bekerja secara penuh, akan tetapi hasrat terbentur pada kondisi fisik yang lemah dan tidak memungkinkan, karena kekurangan gizi atau bahkan keterlambatan pengobatan secara dini ketika mereka mulai terserang penyakit.
- e. Mereka yang tidak produktif (the unproductive). adalah mereka yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif akan tetapi mereka tidak memiliki sumber-sumber daya komplemen yang memadai untuk menghasilkan output, yang mereka miliki hanya tenaga, sehingga meskipun mereka sudah bekerja keras hasilnya tetap saja tidak memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (2005 :h.355) pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau memper siapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak mendapat pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 1999, h. 15).

Menurut Bachrowi Sanusi (2004, h. 19) faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat hidup di negara-negara berkembang yakni kurangnya penggunaan tenaga kerja yang efisien dibandingkan dengan di negara-negara maju. Penggunaan tenaga kerja dibawah standar disebabkan faktor: pertama yakni keadaan setengah penganggur (underemployment) penduduk kota maupun desa yang bekerja di bawah jam kerja normal (kerja harian, mingguan atau musiman). Termasuk pula yang tergolong bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi tingkat produktivitasnya rendah sehingga pengurangan jam kerja tidak terpengaruh terhadap total output. Faktor kedua yakni pengangguran terbuka yaitu penduduk mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan.

Menurut Yustika A.E. (2007, h. 216) Indonesia sedang dikepung oleh dua soal ekonomi yang gawat, yang sebetulnya saling berhubungan, yakni pengangguran dan kemerosotan investasi (disamping masalah kronis lainnya, misalnya kemiskinan). Dua masalah fundamental itu sangat mencemaskan karena salah satu inti kebijakan ekonomi sebetulnya sekedar menggerakkan kegiatan investasi yang membuka ruang lapangan kerja, sehingga memiliki implikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (mengurangi kemiskinan). Dengan demikian, dua masalah di atas tidaklah berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang terintegrasi dan saling mempengaruhi. Faktanya, pengambil kebijakan terus memproduksi kebijakan konvensional yang kurang menunjukkan kedalaman wawasan persoalan yang sedang dihadapi.

Dalam kasus investasi, misalnya, soalnya bukan sekadar berapa jumlah proyek dan nilai yang diinvestasikan, tapi juga pilihan jenis investasi sangat mempengaruhi intensitas penyerapan tenaga kerja. Misalnya investasi di pasar keuangan semata dapat menimbulkan persoalan laten yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang mirip buih (Bubble) sehingga gampang luruh. Kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan, pengangguran merupakan persoalan kronis dalam perekonomian yang hampir selalu mengiringi pembangunan ekonomi. .

Menurut Keynes dalam Deliarinov (2003, h. 166), tidak ada mekanisme penyesuaian (Adjustment) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan (equilibrium) pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Apabila tingkat upah bisa diturunkan, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat mendorong turunnya harga.

Apabila harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjin tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja hanya turun sedikit. tetapi begitupun tetap saja jumlah tenaga kerja yang tertampung lebih kecil dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika harga-harga turun drastis menyebabkan kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung jadi semakin kecil, dan pengangguran semakin luas.

Kemiskinan

Menurut Siregar (2006, h. 54). Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan, Kemiskinan absolut (E. Wayne Nafziger, 1994, h.127) adalah satu konsep yang berbeda dengan ketidaksetaraan pendapatan, adalah berada dibawah pendapatan yang menjamin kebutuhan pokok seperti makanan, sandang dan papan. Atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin ditambahkan. Sementara Menurut Amartya Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada

ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen. Manakala garis kemiskinan menjadi pertimbangan, maka inflasi menjadi variabel yang relevan.

Sebagai ilustrasi: suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat lebih rendah dari laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel untuk mengurangi kemiskinan; variabel lain, seperti laju inflasi, juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

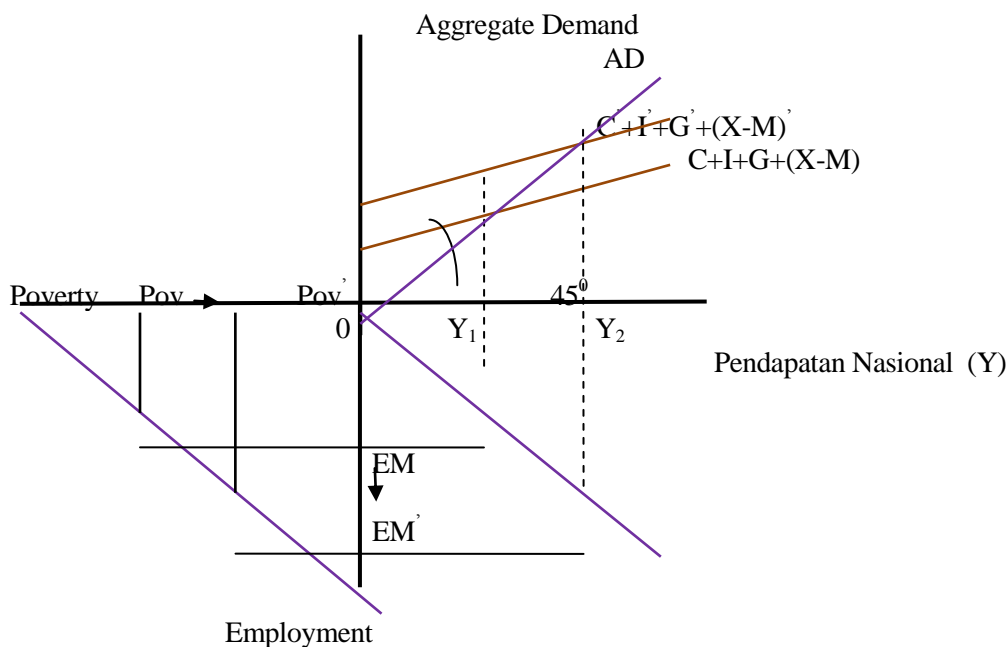
Siregar (2006, h. 72) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal. Menurut Marsuki (2005, h. 80), upaya untuk mengentaskan kemiskinan, dengan cara bantuan pembangunan dari luar, pengalihan sumber-sumber keuangan dan pengetahuan serta mendatangkan tenaga ahli dari negara-negara maju, bukanlah cara yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melainkan diupayakan penyelesaian dengan pendekatan-pendekatan baru yang inovatif, yaitu melalui metode-metode antisipasi terhadap

perkembangan masa depan, belajar dari masa depan. Dalam hal ini kunci pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan adalah saling berbagi pengetahuan dan tanggung jawab di antara pelaku-pelaku lokal dan eksternal, perencanaan, partisipatif, pemantauan dan evaluasi. Ringkasnya adalah lingkaran setan kemiskinan dapat ditemukan solusinya dengan cara menggali pemahaman-pemahaman baru tentang peran nilai-nilai tradisional sebagai basis dalam pengembangan perilaku SDM miskin atau melalui pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal yang tersedia, upaya-upaya memberi peran aktif dari lembaga-lembaga terorganisir yang ada ditingkat lokal, atau

memberdayakan sektor informal yang ada, serta memberi peran dan peluang aktif pada perempuan untuk berusaha.

Kerangka Pemikiran

Setelah mengkaji landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari pendekatan Teori Penentuan Pendapatan Nasional (National Income Determination) dari John Maynard Keynes dalam Yuyun Wirasasmita (2010) yang memperkenalkan Aggregate Supply Function dan Aggregate Demand Function.. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam gambar 2.6 berikut:



Gambar 6. Pertumbuhan Aggregate Demand, Pengangguran dan Kemiskinan Menurut John Maynard Keynes dan Yuyun Wirasasmita

Selanjutnya menurut Keynes perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) Pendekatan atau cara, yaitu :

- 1). Pendekatan/cara Pengeluaran (Expenditure Approach), Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluar keatas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut
- 2). Pendekatan/cara Produksi (Product Approach), dengan cara ini pendapatan nasional di hitung dengan menjumlahkan produk neto (net output) berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Cara ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah produksi yang diwujudkan oleh

berbagai sektor dalam perekonomian.

- 3). Pendekatan pendapatan (Income Approach), Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Perhitungan pendapatan nasional maupun pendapatan regional (Produk Domestik Regional Bruto) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan/cara produksi merupakan pendapatan nasional dan regional sisi penawaran. Sementara perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan/cara pengeluaran merupakan pendapatan nasional dan regional sisi permintaan. Selanjutnya teknik perhitungan yang banyak

digunakan di negara-negara maju, seperti Belanda, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat, dimana pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan/cara pengeluaran (Expenditure Approach). Metode ini dapat memberi gambaran tentang sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Perhitungan pendapatan nasional (PDB) adalah menjumlahkan pengeluaran berbagai jenis pengeluaran : pengeluaran rumahtangga (konsumsi= C), pengeluaran perusahaan (Investasi = I), pengeluaran pemerintah (G), dan pengeluaran untuk pembelian barang-barang impor dan ekspor atau pengeluaran oleh orang lain dari luar negeri (X – M). Berdasarkan hal-hal tersebut maka pendapatan nasional (PDB) = Y = C + I + G + X - M. Hasil perhitungan pendapatan nasional tersebut menghasilkan nilai/angka PDB yang sama dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau output/nilai tambah (Yuyun Wirasmita, 2010).

Pembangunan dalam perspektif yang lebih luas dapat dianggap sebagai seperangkat perubahan yang saling berkaitan dalam suatu struktur ekonomi. Lewis dengan Model Dua-Sektornya atau Dual-Economy dalam Chenery, (1979, h. 5) menyatakan pembangunan sebagai transisi dari bentuk-bentuk produksi dan perilaku ekonomi yang tradisional ke modern. Sepanjang periode transisi, penawaran tenaga kerja yang kurang terampil menjadi elastis; demikian pula profit, tabungan, dan investasi meningkat; industri tumbuh lebih cepat dibandingkan pertanian; dan pola perdagangan internasional berangsur-angsur berubah sebagai keunggulan kompetitif.

Mengacu pada Lewis dan Kuznets, dalam Chenery (1979, h. 5) berpendapat bahwa transisi harus diukur oleh akumulasi dari seluruh modal (baik modal fisik maupun modal manusia) dan oleh transformasi dari struktur permintaan, produksi, perdagangan, dan ketenaga-kerjaan sebagai tingkat peningkatan pendapatan.

Chenery (1979, h. 6) mendefinisikan bahwa transisi dari ekonomi tradisional ke ekonomi berkembang adalah seperangkat perubahan dalam struktur ekonomi yang diperlukan untuk

menjaga keberlanjutan dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses-proses yang membentuk transisi meliputi perubahan-perubahan pada seluruh fungsi-fungsi ekonomi, yaitu: peningkatan dalam kapasitas produksi (akumulasi modal dan keterampilan), transformasi sumberdaya yang digunakan (permintaan, produksi, perdagangan, dan faktor penggunaan); serta proses-proses sosio-ekonomi seperti: urbanisasi, distribusi pendapatan, dan transisi demografis.

Lebih lanjut Chenery (1979, h. 7) menyatakan bahwa transisi ekonomi dapat dianggap berisikan sejumlah proses-proses ekonomi yang saling berhubungan secara struktural. Mengacu pada hukum Engel dimana permintaan pangan diestimasi sebagai fungsi dari pendapatan dan harga, Chenery membuat perkiraan serupa dimana perubahan komposisi permintaan untuk seluruh kelompok komoditas diestimasi sebagai fungsi dari pendapatan.

Model Perubahan Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi dari Chenery and Syrquin dalam Chenery (1979, h. 17) menggambarkan perubahan struktur ekonomi (share dari sektor-sektor produksi) sebagai fungsi dari pendapatan perkapita dalam perspektif sisi permintaan (demand side).

Berangkat dari berbagai hasil penelitian dan berbagai pemikiran di atas, Model Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi rumahtangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor netto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto sisi penawaran yang menurut BPS dapat dibagi berdasarkan sektor Primer, sektor Sekunder maupun sektor Tersier, Yang dikatakan sektor Primer atau sektor pertanian meliputi sektor 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian. Sektor Sekunder atau yang sering disebut sektor industri meliputi sektor 1) Industri Pengolahan, 2) Listrik, Gas dan Air Bersih, 3) Bangunan. Sektor Tersier atau sering disebut sektor jasa meliputi sektor; 1) Perdagangan,

Hotel dan Restoran, 2) Pengangkutan dan Komunikasi, 3) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 4) Jasa-jasa. (BPS, 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu daerah pada suatu tahun tertentu. Sedangkan partum buhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilakukan dengan cara membandingkan PDRB dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pemikiran Chenery (1979, h.6) dan BPS (2008) maka selain model penelitian di atas, penelitian ini juga memodelkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam perspektif sisi penawaran (supply Side) yaitu pertumbuhan PDRB sektor primer, sektor sekunder dan sektor terier terhadap pertumbuhan pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian variabel-variabel pengeluaran agregat yang menentukan pertumbuhan PDRB terdiri dari variabel-variabel berikut ini:

- 1). Pengeluaran konsumsi perorangan dan rumahtangga (personal consumption expenditure) yang terdiri dari pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama (durable goods) dan yang tidak. Pengeluaran biasanya disingkat C.
- 2). Pembentukan modal sektor swasta, sering dinyatakan sebagai investasi (I), pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Membangun gedung perkantoran, mendirikan bangunan industri, membeli alat-alat memproduksi ialah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong sebagai investasi. Pengeluaran itu bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk digunakan pada kegiatan memproduksi di waktu akan datang.
- 3). Pengeluaran pemerintah (Government expenditure) disingkat G. Pengeluaran pemerintah untuk membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan polisi dan tentara, gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur. Pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua

golongan yang utama: pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi, pelabuhan dan sebagainya.

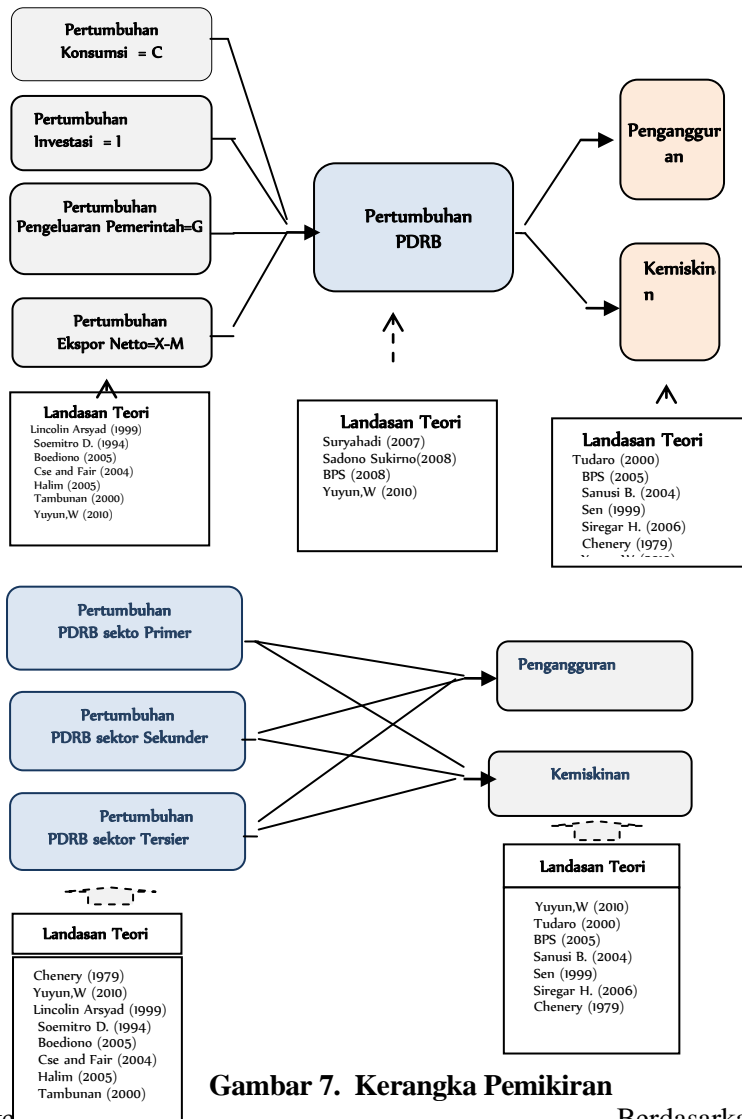
- 4). Ekspor netto. Nilai ekspor yang dilakukan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu. Ekspor sesuatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Di kurangi dengan nilai pengeluaran untuk Impor barang dan jasa termasuk teknologi di datangkan atau di beli dari negara lain.
- 5). Guna menjelaskan peran pengeluaran agregat berupa konsumsi perorangan/rumahtangga (C), Investasi swasta (I), pengeluaran Pemerintah (G), Ekspor netto (X-M) terhadap pada pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung, serta Pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder, sektor Tersier terhadap kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung

Berlandaskan teori dan fenomena yang berkembang serta hasil-hasil penelitian yang relevan, maka skema paradigma penelitian diatas dapat di jelaskan sebagai berikut

- 1). Variabel pengeluaran agregat seperti pertumbuhan Konsumsi rumahtangga (C), Investasi Swasta (I), Pengeluaran Pemerintah (G), Ekspor netto (X-M) baik secara simultan maupun parsial sangat menentukan perkembangan Produk domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya PDRB dapat berpengaruh terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung
- 2). Pertumbuhan Produk domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier baik secara simultan maupun parsial dapat menentukan perkembangan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Dengan berpedoman pada skema

paradigma penelitian dan penjelasan di atas maka dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 7. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. Pertumbuhan Pengeluaran agregat yang terdiri dari; Pengeluaran Konsumsi (C), Pengeluaran Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G), Ekspor Netto (X-M) mempengaruhi pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.
2. Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.
3. Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
4. Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Lampung.
5. Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah ditetapkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1
 - 1) Pengeluaran Agregat yaitu; pengeluaran Konsumsi Rumah tangga, Investasi Swasta, pengeluaran Pemerintah, Ekspor Netto berpengaruh secara **Simultan** (bersama-sama) terhadap pertumbuhan Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung.
 - 2) Pengeluaran Agregat yaitu; pengeluaran Konsumsi Rumah tangga, Investasi Swasta, pengeluaran Pemerintah, Ekspor Netto berpengaruh positif secara **parsial** (masing-masing variabel) terhadap pertumbuhan Poduk Domestik Regional

Hipotesis Penelitian

- Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung.
2. Hipotesis 2
Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.
 3. Hipotesis 3
Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
 4. Hipotesis 4.
 - 1) Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier berpengaruh secara **simultan** (secara bersama-sama) terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.
 - 2) Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier berpengaruh negatif secara **parsial** (masing-masing variabel) terhadap pengangguran di Provinsi Lampung.
 5. Hipotesis 5.
 - 1) Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier berpengaruh secara **simultan** (secara bersama-sama) terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.
 - 2) Terdapat minimal satu memiliki pengaruh positif pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara **Parsial** (masing-masing variabel) terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Pengaruh positif dari hipotesis di atas menjelaskan minimal terdapat satu variabel pengeluaran agregat yang berpengaruh positif atau berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan pengaruh negatif menjelaskan minimal terdapat satu variabel dari pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan selama 1 tahun yang di mulai dari bulan sptember 2010 sampai dengan bulan oktober 2011, yang meliputi proses perencanaan; terdiri dari tahap persiapan, tahap penjajagan, tahap penyusunan

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. Batasan Operasional Variabel

usulan penelitian dan seminar usulan penelitian. Proses Pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian meliputi; melakukan penelitian (pengumpulan data), pengolahan data dan penyusunan disertasi serta pelaporan hasil penelitian.

Tempat penelitian adalah Provinsi Lampung yang terdiri dari 10 Kabupaten dan Kota, meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.

Data tentang pertumbuhan ekonomi, pengeluaran agregat, pengangguran dan kemiskinan yang di peroleh dari masing-masing Kabupaten dan Kota selanjutnya di padukan dengan data perekonomian, pengangguran dan kemiskinan yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPEDA) serta dari Dinas Kependudukan Provinsi Lampung.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*. Penggunaan metode *explanatory* karena penelitian bertujuan untuk menjelaskan hubungan (kausal atau pengaruh) antar variabel dan menguji hipotesis karena penelitian juga bertujuan untuk penjajagan (Singarimbun, 1995, h. 4). Hubungan kausal antar variabel yang dijelaskan adalah pengaruh *pengeluaran agregat* (konsumsi rumahtangga, investasi swasta, pengeluaran Pemerintah, ekspor netto) terhadap *pertumbuhan* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung dan hubungan kausal PDRB terhadap *pertumbuhan* Pengangguran dan Kemiskinan. Selanjutnya hubungan kausal antar variabel *pertumbuhan* PDRB sektor Primer, sektor Sekunder, sektor Tersier terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Variabel	Indikator	Satuan/Skala
Konsumsi RT (X ₁)	Seluruh pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk pembelian barang dan jasa serta penge-luaran konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	persentase (Rasio)
Investasi (X ₂)	Pertumbuhan nilai Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dan perubahan stok	persentase (Rasio)
Pengeluaran Pemerintah (X ₃)	Seluruh pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto	persentase (Rasio)
Ekspor netto (X ₄)	Perubahan Nilai barang dan jasa yang di ekspor ke luar negeri setelah dikurangi dengan perubahan Nilai pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari luar negeri	persentase (Rasio)
PDRB (Y _d)	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai pengaluan agregat sektor ekonomi regional.	persentase (Rasio)
PDRB sektor Primer (Y ₁)	Pertumbuhan nilai produksi hasil sektor pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan/ penggalian	persentase (Rasio)
PDRB sektor Sekunder (Y ₂)	Pertumbuhan nilai produksi sektor Industri pengolahan, subsektor Listrik,Gas dan Air minum serta sektor Bangunan/konstruksi	persentase (Rasio)
PDRB sektor Tersier (Y ₃)	Pertumbuhan nilai tambah yang diperoleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoren, sektor Pengangkutan dan komunikasi,sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya serta Jasa lain	persentase (Rasio)
Pengangguran (Z ₁)	Perubahan jumlah orang yang menganggur / pengangguran terbuka	Orang/ jiwa (Rasio)
Kemiskinan (Z ₂)	Persentase penduduk miskin menurut kreteria penduduk miskin oleh BPS,kemiskian adalah penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar	Orang/ jiwa (Rasio)

Formulasi Model Penelitian

Formulasi Model dalam penelitian ini yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda (*Multivariate Linear Regression Analysis*) dengan teknik *Ordinary Least Square (OLS)*. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel pertumbuhan konsumsi rumahtangga (C), Investasi swasta (I), Pengeluaran Pemerintah (G), Ekspor netto (X-M). Sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto PDRB (Y_d), dan hubungan pertumbuhan PDRB (Y_d) dengan Pengangguran (Z₁) dan Kemiskinan (Z₂). Selanjutnya hubungan variabel bebas pertumbuhan PDRB

sektor Primer, sektor Sekunder, sektor Tersier dengan variabel terikat Pengangguran (Z₁) dan Kemiskinan (Z₂).

1). Pengaruh setiap variabel bebas penaluaran agregat yang meliputi; pertumbuhan Konsumsi rumahtangga (X₁), Investasi Swasta(X₂), Pengeluaran Pemerintah (X₃), Ekspor netto (X₄) terhadap pertumbuhan PDRB (Y_d) dapat dirumuskan melalui persamaan matematik yang selanjutnya menggunakan statistik melalui persamaan regresi linier berganda yang tertuang dalam persamaan berikut:

Persamaan (Model) 1 Hubungan Fungsional.

$$Y_d = f (X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Persamaan Regresi

$$Y_d = \alpha_1 + \beta_{11} X_{11} + \beta_{21} X_{21} + \beta_{31} X_{31} + \beta_{41} X_{41} + \epsilon$$

- 2). Pengaruh variabel bebas pertumbuhan PDRB (Y_d) terhadap Pengangguran (Z_1) dapat dirumuskan melalui persamaan matematik yang selanjutnya menggunakan statistik melalui persamaan regresi linier sederhana yang tertuang dalam persamaan berikut:

Persamaan (Model) 2 Hubungan Fungsional.

$$Z_1 = f (Y_d)$$

Persamaan Regresi

$$Z_1 = \alpha + \beta Y_d + \epsilon$$

- 3). Pengaruh setiap variabel bebas pertumbuhan PDRB (Y_d) terhadap kemiskinan (Z_2) dirumuskan melalui persamaan matematik yang selanjutnya menggunakan statistik melalui persamaan regresi linier sederhana, seperti yang tertuang dalam persamaan berikut:

Persamaan (Model) 3 Hubungan Fungsional.

$$Z_2 = f (Y_d)$$

Persamaan Regresi

$$Z_2 = \alpha + \beta Y_d + \epsilon$$

- 4). Pengaruh setiap variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2), sektor Tersier (Y_3) terhadap Pengangguran (Z_1) dapat dirumuskan melalui persamaan matematik yang selanjutnya menggunakan statistik melalui persamaan regresi linier berganda seperti yang tertuang dalam persamaan berikut:

Persamaan (Model) 4 Hubungan Fungsional.

$$Z_1 = f (Y_1, Y_2, Y_3)$$

Persamaan Regresi

$$Z_1 = \alpha_1 + \beta_{11} Y_{11} + \beta_{21} Y_{21} + \beta_{31} Y_{31} + \epsilon$$

- 5). Pengaruh setiap variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2), sektor Tersier (Y_3) terhadap Kemiskinan (Z_2) dapat dirumuskan melalui persamaan matematik yang selanjutnya menggunakan statistik dengan persamaan regresi berganda, seperti yang tertuang dalam persamaan berikut:

Persamaan (Model) 5 Hubungan Fungsional.

$$Z_2 = f (Y_1, Y_2, Y_3)$$

Persamaan Regresi

$$Z_2 = \alpha_2 + \beta_{12} Y_{12} + \beta_{22} Y_{22} + \beta_{32} Y_{32} + \epsilon$$

Dimana:

X_1 = Pertumbuhan Konsumsi rumahtangga (C)

X_2 = Pertumbuhan Investasi (I)

X_3 = Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah (G)

X_4 = Pertumbuhan Ekpor netto (X-M)

Y_d = Pertumbuhan PDRB

Y_1 = Pertumbuhan sektor Primer

Y_2 = Pertumbuhan sektor Sekunder

Y_3 = Pertumbuhan sektor Tersier

Z_1 = Pengangguran

Z_2 = Kemiskinan

α_i = Konstanta/intersep (dimana α_j)

α_j = total *Multi Sector Productivity*

β_i = koefisien regresi yang menunjukkan elastisitas dari masing-masing variabel

ϵ_i = Pengaruh variabel lain di luar model ditetapkan atau *galat/residu/error*

Rencana Pengujian Koefisien Regresi

Persamaan regresi dalam masing-masing model di atas diuji dengan uji keberartian koefisien regresi linear berganda, baik secara simultan maupun parsial dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

1) Pengujian hipotesis Model 1

- a) Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara **Simultan**:

$$H_0.j : \beta_{ij} = 0:$$

Semua koefisien regresi β_{ij} sama dengan nol atau kontribusi seluruh variabel bebas pengeluaran agregat, yaitu; pertumbuhan konsumsi (X_1), investasi (X_2), pengeluaran pemerintah (X_3), ekspor netto (X_4) tidak berpengaruh secara **Simultan** terhadap pertumbuhan PDRB (Y_d).

$$H_a.j : \beta_{ij} \neq 0:$$

Minimal terdapat satu koefisien regresi β_{ij} , tidak sama dengan nol atau kontribusi seluruh variabel pengeluaran agregat berpengaruh secara **simultan** terhadap pertumbuhan PDRB (Y_d).

- b) Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara **Persial** :

$$H_0 : \beta_{i(1-4)} = 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{i(1-4)}$ sama dengan nol atau kontribusi pengaluan agregat, yaitu; pertumbuhan konsumsi (X_1), investasi (X_2), pengeluaran pemerintah (X_3), ekspor netto (X_4) ke-i tidak berpengaruh positif secara *parsial* terhadap pertumbuhan PDRB (Y_d).

$$H_a : \beta_{i(1-4)} \neq 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{i(1-4)}$ tidak sama dengan nol atau kontribusi pengaluan agregat, yaitu; pertumbuhan konsumsi (X_1), investasi (X_2), pengeluaran pemerintah (X_3), ekspor netto (X_4) ke-i berpengaruh positif secara *parsial* terhadap pertumbuhan PDRB (Y_d).

2) Pengujian Hipotesis Model 2

Hipotesis nol dan alternatifnya:

$$H_o : \beta_{(Y_d)} = 0:$$

Koefisien regresi PDRB ($\beta_{(Y_d)}$) sama dengan nol atau kontribusi pertumbuhan PDRB (Y_d) tidak berpengaruh positif terhadap pengangguran (Z_1).

$$H_a : \beta_{(Y_d)} \neq 0:$$

Koefisien regresi PDRB ($\beta_{(Y_d)}$) tidak sama dengan nol atau kontribusi pertumbuhan PDRB (Y_d) berpengaruh positif terhadap pengangguran (Z_1).

3) Pengujian Hipotesis Model 3

Hipotesis nol dan alternatifnya:

$$H_o : \beta_{(Y_d)} = 0:$$

Koefisien regresi pertumbuhan PDRB ($\beta_{(Y_d)}$) sama dengan nol atau kontribusi pertumbuhan PDRB (Y_d) tidak berpengaruh positif terhadap Kemiskinan (Z_2).

$$H_a : \beta_{(Y_d)} \neq 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{(Y_d)}$, tidak sama dengan nol atau kontribusi pertumbuhan PDRB (Y_d) berpengaruh positif terhadap Kemiskinan (Z_2).

4) Pengujian Hipotesis Model 4

a) Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara **Simultan**:

$$H_o .j : \beta_{ij} = 0:$$

Semua koefisien regresi β_{ij} sama dengan nol atau kontribusi seluruh variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i tidak berpengaruh secara *Simultan* terhadap Pengangguran (Z_1)

$$H_a .j : \beta_{ij} \neq 0:$$

Minimal terdapat satu koefisien regresi β_{ij} , tidak sama dengan nol atau kontribusi seluruh variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i berpengaruh secara *Simultan* terhadap Pengangguran (Z_1).

b) Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Model 4

Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara **Persial**:

$$H_o : \beta_{i(1-3)} = 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{i(1-3)}$ sama dengan nol atau kontribusi variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i tidak berpengaruh

negatif secara *parsial* terhadap Pengangguran (Z_1).

$$H_a : \beta_{i(1-3)} \neq 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{i(1-3)}$ tidak sama dengan nol atau kontribusi variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i berpengaruh negatif secara *parsial* terhadap Pengangguran (Z_1).

5) Pengujian Hipotesis Model 5

a) Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara **Simultan**:

$$H_o .j : \beta_{ij} = 0:$$

Semua koefisien regresi β_{ij} sama dengan nol atau kontribusi seluruh variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i tidak berpengaruh secara *Simultan* terhadap Kemiskinan (Z_2).

$$H_a .j : \beta_{ij} \neq 0:$$

minimal terdapat satu koefisien regresi β_{ij} , tidak sama dengan nol atau kontribusi seluruh variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i berpengaruh secara *Simultan* terhadap Kemiskinan (Z_2).

b) Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Model 5

Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara **Persial**

$$H_o : \beta_{i(1-3)} = 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{i(1-3)}$ sama dengan nol atau kontribusi variabel pertumbuhan

PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i tidak memiliki salah satu sektor/variabel yang berpengaruh positif secara *parsial* terhadap Kemiskinan (Z_2).

$$H_a : \beta_{i(1-3)} \neq 0:$$

Koefisien regresi $\beta_{i(1-3)}$ tidak sama dengan nol atau kontribusi variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1), sektor Sekunder (Y_2) dan sektor Tersier (Y_3) ke-i memiliki salah satu sektor/variabel yang berpengaruh secara *parsial* terhadap Kemiskinan (Z_2).

Rekapitulasi hasil pengukuran dan perbandingan elastisitas antar variabel pengeluaran agregat; Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor dan Impor terhadap pertumbuhan PDRB dan peran pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan, serta pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder, sektor Tersier terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung disajikan dalam tabel di bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran

Tabel 4. Hasil Uji Pengaruh Parsial Pertumbuhan Konsumsi, Investasi, pengeluaran Pemerintah ekspor netto terhadap Pertumbuhan PDRB

Pengaruh Parsial	Koefisien Regresi terhadap PDRB
Kontribusi Konsumsi rumahtangga (X_1)	1,089
Kontribusi Investasi Swasta (X_2)	0,609
Kontribusi Pengeluaran Pemerintah (X_3)	1,561
Kontribusi Ekspor netto (X_4)	-0,363

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengukuran pada tabel di atas Konsumsi rumahtangga dan Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah masih mendominasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung. Pengeluaran Pemerintah memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Lampung yaitu sebesar 1,561 satuan selanjutnya diikuti oleh konsumsi rumahtangga dan Investasi swasta yang masing-masing 1,089 satuan dan 0,609 satuan.

Dari keempat variabel pengeluaran agregat tersebut di atas, ternyata yang memberikan

kontribusi negatif terhadap pertumbuhan PDRB adalah ekspor netto. Hal ini sejalan dengan hasil Kajian ekonomi Regional Provinsi Lampung (BI, 2009, h. 6), yang menyatakan bahwa ekspor Lampung secara tahunan

mengalami pertumbuhan negatif, sebagai akibat dari penurunan semua sektor pertanian, industri manufaktur, pertambangan dan penggalian. Sementara impor Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama impor komoditas oil, grain, seeds dan fruits yang mencapai 23.96 juta kg yang rata-rata berkisar antara 1.419,167 US\$ pada tahun 2008-2009, selain impor barang konsumtif lainnya.

Rakapitulasi Pengukuran pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Parsial Pertumbuhan Pertumbuhan PDRB (Aggregate Demand) terhadap pertumbuhan pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung

Pengaruh Parsial	Koefisien Regresi (β_i)	
	Pengangguran (Z_1)	Pdd. Miskin (Z_2)
Kontribusi PDRB (Y_d)	0,004	0,0000184

Memperhatikan hasil pengukuran pengaruh atau kontribusi pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan Pengangguran dan kemiskinan di atas, ternyata pertumbuhan PDRB justru menambah pengangguran dan kemiskinan. Bila dilihat dari nilai koefisien regresi, nilai koefisien yang terbesar adalah kontribusi pertumbuhan PDRB terhadap Jumlah kemiskinan, yaitu sebesar 0,0000184 satuan, hal ini menggambarkan bahwa; walaupun pertumbuhan Pendapatan Regional Provinsi Lampung meningkat namun alokasinya bukan di tujukan untuk mengatasi kemiskinan atau bukan di gunakan untuk kegiatan yang produktif yang dapat mengurangi kemiskinan.

Kontribusi pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran di perlihatkan oleh koefisien

Tabel 6. Hasil Uji Pengaruh Parsial Pertumbuhan PDRB sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung

Pengaruh Parsial	Koefisien Regresi (β_i)	
	Pengangguran (Z_1)	Kemiskinan (Z_2)
Kontribusi PDRB sektor Primer (Y_1)	-9,341	-1,471825
Kontribusi PDRB sektor Sekunder (Y_2)	0,554	0,689
Kontribusi PDRB sektor Tersier (Y_3)	-1,070	0,737

Dalam hal penurunan jumlah penduduk miskin, berdasarkan koefisien Regresi, pertumbuhan sektor Primer sangat berperan dalam menurunkan kemiskinan, yaitu bernilai -1,47183, nilai koefisien PDRB sektor Primer tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan sektor primer dapat menurunkan kemiskinan. Sementara pertumbuhan PDRB sektor Sekunder dan sektor Tersier justru berlawanan dengan logika teori, karena hasil koefisien regresi pertumbuhan sektor industri pengolahan, listrik-gas, air minum dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoren, sektor Pengangkutan dan komunikasi, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya serta sektor Jasa lain akan menambah kemiskinan. Karena hasil koefisien regresi bernilai 0,686 untuk sektor Sekunder menyumbang dalam peningkatan kemiskinan dan 0,737 pertumbuhan sektor Tersier mendorong peningkatan kemiskinan.

regresi sebesar 0,004, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan PDRB tidak mampu menambah lapangan kerja bagi penduduk Lampung, yang dengan demikian pengangguran belum dapat di kurangi.

Rekapitulasi pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier terhadap pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung dapat terlihat pada tabel

Hasil koefisien regresi pengaruh Pertumbuhan PDRB sektor Primer bernilai -9,341 dan sektor Tersier bernilai -1,070 cukup dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan pengangguran, sementara pertumbuhan PDRB sektor Sekunder justru pertumbuhannya mendorong peningkatan pengangguran, yaitu sebesar 0,554 satuan.

Interpretasi

1) Hasil Analisis Koefisien Regresi model 1.

Pengaruh variabel pengeluaran agregat, yaitu pertumbuhan Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekpor netto terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan diperoleh hasil $R = 0,909$ dan $R^2 = 0,909$. Hal ini berarti secara statistik variabel konsumsi rumahtangga, investasi, pengeluaran Pemerintah, ekspor netto terhadap PDRB adalah sebesar 90,9 persen ($R^2 = 0,909$), sedangkan sisanya hanya 9,1 persen di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di perhitungkan di dalam model.

Berdasarkan hasil olah data koefisien regresi pengaruh pengeluaran agregat, yaitu pertumbuhan Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekpor dan Impor terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) melalui model persamaan regresi sebagai berikut :

Koefisien pertumbuhan penge luaran konsumsi rumahtangga (X_1) meningkat sebesar 1 persen ceteris paribus (Investasi, pengeluaran Pemerintah, ekspor netto dianggap konstan), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDRB (Y_d) Provinsi Lampung sebesar 1,089 satuan. Konsumsi rumahtangga sangat tergantung pada besarnya pendapatan [$C = f (Y)$], artinya semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pengeluaran konsumsi rumahtangga. Hasil koefisien regresi tersebut sejalan dengan hasil Uji t (uji parsial) yang di peroleh $t_{hitung} = 6,922 > t_{tabel} (n-k-1 = 35 - 4-1) = 1,697$ Ho di tolak terima Ha ($t_h > t_i$)

Menurut Keynes yang di kutip Case and Fair (2004, h. 272) konsumsi adalah fungsi dari pendapatan, selanjutnya konsumsi akan dapat meningkatkan pendapatan. Dalam teori Pendapatan Nasional, peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumsi masyarakat/rumah tangga akan meningkat. Peningkatan konsumsi rumahtangga masyarakat akan meningkatkan pendapatan nasional.

Selanjutnya selaras pula dengan pendapat Sadono Sukirno (2002, h. 38), pendapatan yang diterima oleh rumahtangga digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membiayai jasa angkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan, barang-barang tersebut dibeli rumahtangga untuk memenuhi kebutuhannya.

Peningkatan permintaan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya akan meningkatkan harga dan output Nasional. Pengeluaran rumahtangga di gunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa dan sebagian untuk ditabung (N, Gregory Mankiw terjemahan Criswan Sungkono, 2006, h. 12) barang dan jasa yang dikonsumsi di antaranya hasil produksi seperti; industri pengolahan, listrik, gas dan air minum yang berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dalam berulang-ulang mengalami kenaikan serta bangunan dan konstruksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga akan meningkatkan Pendapatan Regional.

Koefisien Investasi (X_2) = 0,609 meningkat sebesar satu persen sementara pengeluaran

konsumsi rumahtangga, pengeluaran Pemerintah, ekspor dan impor dianggap konstan, maka akan meningkatkan PDRB (Y_d) 0,609 satuan. Investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertanian dan pertambangan/penggalian khususnya di Provinsi Lampung yang memiliki lahan pertanian cukup luas, yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional. Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Sadono Sukirno (2002, h. 106), investasi disebut juga *penanaman modal* atau *pembentukan modal*. Peningkatan investasi akan meningkatkan pengeluaran agregat dalam perekonomian dan digunakan oleh perusahaan untuk membeli barang dan jasa modal guna menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang berarti peningkatan dalam pendapatan nasional. Selanjutnya tambahan investasi akan menciptakan tambahan yang lebih besar terhadap pendapatan nasional, hal ini disebut efek ganda investasi atau Multiplier Effect (Yuyun Wirasmita, 2010).

Investasi swasta di Provinsi Lampung berperan dalam meningkatkan produksi pertanian seperti investasi pada perkebunan karet, kelapa sawit dan industri gula. Sedangkan investasi di sub sektor pertambangan ditujukan untuk peningkatan produksi batu bara dan batu belah (BPS Lampung, 2010). Peran investasi pada kedua sub sektor tersebut terhadap PDRB lampung cukup besar yaitu rata-rata 42,06 persen pertahun selama tahun 1980-2009.

Pengeluaran Pemerintah berda sarkan hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh 1,561 yang berarti bila pengaluaran pemerintah meningkat sebesar 1 satuan, sementara konsumsi rumah tangga, Investasi, ekspor netto dianggap konstan, maka akan meningkatkan pertumbuhan PDRB (Y_d) Lampung sebesar 1,561 satuan. Bertolak dari perhitungan koefisien regresi tersebut berarti bahwa pengeluaran Pemerintah memberikan sumbangan terhadap peningkatan PDRB. Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembanguan lebih di tujukan untuk peningkatan Infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, irigasi dan sebagainya, dengan demikian pengeluaran pemerintah tidak secara langsung meningkatkan produksi berbagai sektor ekonomi, sesuai dengan pendapat Rahman Mulyawan, 2002, h. 4.18).

Dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang-barang publik, mengalokasikan barang-barang produksi maupun konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peranan pemerintah ini dianggap penting terutama karena adanya barang-barang umum (public goods), ketidaksempurnaan pasar, persoalan distribusi pendapatan dan upaya menjaga alokasi barang secara efisien dan adil.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah Lampung tidak langsung di tujukan untuk meningkatkan nilai produksi berbagai sektor ekonomi namun hanya berperan sebagai pendorong kegiatan produksi pertanian dan pertambangan.

Bila ekspor netto ($X-M = X_4$) dengan koefisien regresi -0,363 meningkat sebesar 1 persen, sementara konsumsi rumahtangga, Investasi, pengeluaran Pemerintah dianggap konstan, maka akan menurunkan PDRB (Y_d) sebesar -0,363 satuan. Berdasarkan data BPS Lampung, ekspor Lampung di dominasi oleh hasil produksi pertanian, seperti kopi, kelapa sawit, lada disamping udang beku walaupun nilai ekspornya relatif rendah karena ekspor bahan baku dan bahan setengah jadi namun cukup memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 21,91 pertahun (1980-2009). Berdasarkan kajian ekonomi regional Lampung (BI Triwilan IV 2009) impor Lampung berupa barang-barang konsumtif bukan merupakan impor bahan baku penolong, bahan baku olahan untuk industri untuk meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, manufaktur, pertambangan dan penggalian. Namun di sisi lain nilai impor pada triwulan ke II-2009 sebesar 67,64 persen sebahagian besar untuk komoditas oil seeds, grain, seeds dan fruits dan barang-barang konsumtif. Dengan demikian meningkatnya nilai impor barang-barang konsumsi yang bukan berupa bahan baku penolong, bahan baku olahan untuk industri tidak memberikan sumbangan terhadap peningkatan produksi berbagai sektor ekonomi.

Dengan demikian peningkatan nilai ekspor setelah di kurangi dengan pengeluaran untuk impor justru tidak memberikan kontribusi

positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

2) Hasil analisis koefisien regresi model 2.

Hasil regresi pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap pengangguran (Z_1), dimana koefisien regresi Y_d bernilai 0,004 yang berarti bila pertumbuhan PDRB Y_d meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain di anggap konstan, maka pengangguran akan meningkatkan sebesar 0,004 satuan, hal ini sejalan dengan hasil uji signifikansi dimana $t_h = 9,002$ ternyata lebih besar dari $t_{tabel} = 1,692$, yang berarti terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan PDRB dengan jumlah pengangguran. Berdasarkan hasil koefisien regresi tersebut ternyata pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung tidak mampu menurunkan jumlah pengangguran bahkan sebaliknya akan meningkatkan pengangguran.

Hasil Koefisien regresi di atas ternyata bertolakbelakang dengan pandangan Arthur Okun (Samuelson and Nordhaus, 2004: 365-366), *Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen.* Menurut N. Gregory Mankiw (2006, h. 246) hukum Okun adalah realisasi negatif antara pengangguran dan GDP, hukum ini (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP riil yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP riil yang mendekati 2 persen. Kenyataan ini berbeda dengan pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung yang memperlihatkan adanya pengaruh positif antara pertumbuhan PDRB dengan pengangguran.

3) Hasil analisis koefisien regresi model 3.

Hasil regresi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan (Z_2), dimana koefisien regresi Y_d bernilai 1.84E-05 atau 0,0000184 yang berarti bila pertumbuhan PDRB Y_d meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi faktor lain di anggap konstan, maka kemiskinan akan meningkatkan sebesar 0,0000184 satuan, hal ini sejalan dengan hasil uji signifikansi dimana $t_h = 4,777$ ternyata lebih besar dari $t_{tabel} = 1,692$, yang berarti terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan PDRB

dengan kemiskinan.

Berdasarkan hasil regresi yang telah di kemukakan di atas ternyata tidak selamanya peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung dapat menurunkan kemiskinan, selama peningkatan pertumbuhan masih mencerminkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bourguignon (2004) bahwa dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan hanya terjadi ketika ketimpangan relatif tinggi (*high inequality*). Dengan kata lain, negara-negara yang mempunyai tingkat ketimpangan yang sedang, apalagi rendah, dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan relatif tidak signifikan. Hasil ini dapat pula diinterpretasi bahwa untuk tingkat pertumbuhan berapapun, semakin turun ketimpangan, semakin besar terjadinya penurunan dalam kemiskinan.

Selanjutnya Bourguignon (2004, h. 118) mendefinisikan sedikitnya dua strategi untuk mengentaskan kemiskinan: (i) mendorong pertumbuhan tingkat pendapatan agregat; dan (ii) melakukan perbaikan distribusi pendapatan secara progressif. Dengan demikian hubungan pertumbuhan PDRB dengan kemiskinan dapat positif (Pertumbuhan PDRB dapat meningkatkan kemiskinan), bila terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan) dan dapat menghasilkan hubungan negatif (Pertumbuhan PDRB dapat menurunkan kemiskinan) bila terjadi pemerataan pendapatan di Provinsi Lampung.

4). Hasil analisis koefisien regresi model 4.

Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier terhadap pertumbuhan Pengangguran di Provinsi Lampung tercermin dari hasil pengaruh simultan (R^2) = 0,994, yang memberikan makna pengaruh ketiga sektor dalam PDRB adalah 0,994 persen terhadap pengangguran, sedangkan sisanya 0,6 persen di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di diperhitungkan dalam model.

Pengaruh pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara simultan terhadap pengangguran ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-masing variabel (model 4) sebagai berikut:

Koefisien regresi variabel nilai produksi PDRB sektor Primer (Y_1) secara statistik diperoleh hasil -0,341, yang berarti bila pertumbuhan PDRB sektor Primer meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi PDRB sektor Sekunder, sektor Tersier dianggap konstan, maka akan menurunkan penganggur sebesar 0,341. Hasil koefisien regresi di atas memberikan arti bahwa, peningkatan nilai produksi sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor dalam PDRB sektor primer dapat mengurangi pengangguran, kenyata ini di Provinsi Lampung (BPS. 2008) terdapat 55,51 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukwika (2003, h. 84), pertumbuhan investasi di sektor pertanian secara nyata meningkatkan kesempatan kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Kenyataan ini selaras pula dengan luasnya lahan pertanian di Provinsi Lampung (14,92 persen dari luas wilayah Lampung, BPS. 2007) memberikan peluang bagi tenaga kerja untuk mekerja di bidang pertanian.

Koefisien regresi untuk nilai pertumbuhan PDRB sektor Sekunder (Y_2) adalah 0,554, yang berarti meningkat nilai produksi PDRB sektor Sekunder sebesar 1 satuan, bila di asumsikan PDRB sektor Primer dan sektor Tersier dianggap konstan, maka akan menambah 0,554 Penganggur (Z_1).

Sektor Industri, listrik-gas-dan air minum, bangunan dan konstruksi yang merupakan bagian dari PDRB sektor Sekunder dalam kenyataannya membutuhkan lebih banyak menyerap modal (padat Modal) dari pada tenagakerja (padat karya). Sedikitnya penyerapan tenagakerja menimbulkan pengangguran bertambah. Dengan demikian bila terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB sektor Sekunder tidak dapat menurunkan pengangguran di Provinsi Lampung, namun sebaliknya dapat menambah pengangguran.

Variabel PDRB sektor Tersier (Y_3) menurut hasil koefisien regresi di peroleh hasil -1,070, yang bermakna bila pertumbuhan PDRB sektor Tersier meningkat sebesar 1 satuan, jika pertumbuhan PDRB sektor Primer dan sektor Sekunder diasumsikan tetap, maka akan menurunkan sebanyak -1,070 penganggur (Z_1). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004, h. 287-289), Hukum Okun menyatakan bahwa "Setiap 2% penurunan GDP potensial, tingkat

pengangguran akan naik sebesar 1%". Jika terdapat peningkatan dalam produksi output nasional, dimana dalam hal ini konsep yang dipakai adalah PDB, akan menaikkan permintaan tenaga kerja sehingga pengangguran turun, maka akan terjadi hubungan yang negatif antara PDB dan pengangguran. Pendapat tersebut mendukung hasil perhitungan koefisien regresi, dimana semakin tinggi nilai produksi PDRB sektor Tersier (sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Bank dan lembaga keuangan serta sektor jasa-jasa) akan mengurangi pengangguran di Provinsi Lampung.

5) Hasil analisis koefisien Regresi model 5.

Hasil Statistik pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier terhadap kemiskinan ditunjukkan oleh hasil R^2 pada persamaan regresi yaitu sebesar 99,7 persen ($R = 0,997$), sedangkan sisanya sebesar 0,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Primer, sektor Sekunder, sektor Tersier terhadap kemiskinan secara parsial dapat di interpretasikan sebagai berikut:

Koefisien regresi variabel pertumbuhan PDRB sektor Primer (Y_1) secara statistik diperoleh hasil -1,471825 yang berarti bila pertumbuhan PDRB sektor Primer meningkat sebesar 1 satuan, asumsi PDRB sektor Sekunder, sektor Tersier dianggap konstan, maka akan menurunkan 1,471835 kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Lampung (2010, Semester II) selama lima tahun terakhir (2004-2005) jumlah penduduk Lampung (angkatan kerja) yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yaitu rata-rata sebesar 11,62 persen atau rata-rata meningkat 213,8 persen di banding lima tahun sebelumnya (1999-2003). Sektor pertanian merupakan sektor lapangan usaha yang tidak membutuhkan skill yang tinggi namun cukup mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat di asumsikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian akan

meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang pada gilirannya akan menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Koefisien regresi pertumbuhan Produksi PDRB sektor Sekunder (Y_2) adalah 0,685 yang berarti meningkat nilai produksi PDRB sektor Sekunder sebesar 1 satuan bila di asumsikan pertumbuhan PDRB sektor Primer dan sektor Tersier dianggap konstan, maka menambah kemiskinan sebesar 0,658 satuan.

Pertumbuhan nilai produksi sektor Sekunder dan tersier, seperti; pertumbuhan sektor Industri, listrik-gas-dan air minum serta bangunan dan konstruksi belum dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini diduga kemiskinan lebih disebabkan adanya kenaikan berbagai tarif dan harga selama kurun waktu 15 tahun terakhir, seperti; Kenaikan Tarif Dasar Listrik yang berulang-ulang, kenaikan berulang kali harga Gas dan tarif Air Minum yang berakibat pada PDRB meningkat namun kemiskinan juga terus meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001); Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Koefisien variabel PDRB sektor Tersier (Y_3) menurut hasil koefisien regresi di peroleh hasil 0,737. Hasil tersebut berarti bila PDRB sektor Tersier meningkat sebesar 1 satuan, (variabel PDRB sektor Primer dan sektor Sekunder diasumsikan konstan), maka akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 0,737 satuan.

Pertumbuhan nilai produksi PDRB sektor Tersier (sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Bank dan lembaga keuangan serta sektor jasa-jasa) dapat menambah kemiskinan baik pada daerah pedesaan maupun pada daerah perkotaan. Kenyataan ini sesuai dengan hasil studi Suryahadi (2006). Studi ini menekankan pada dampak lokasi dan komponen sektoral dari pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan diperdalam dengan membedakan pertumbuhan dan kemiskinan ke dalam komposisi sektoral dan lokasi.

Hasil studi menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di pedesaan menurunkan kemiskinan di semua sektor dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai elastisitas kemiskinan yang tinggi dari semua sektor sehingga dapat meningkatkan kemiskinan. Selain itu pertumbuhan sektor jasa di pedesaan belum mampu penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sektor Tersier belum efektif untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.

Rumusan Hasil Analisis

- 1) Untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Lampung di perlukan peningkatan pengeluaran agregat, khususnya peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga, investasi swasta dan pengeluaran Pemerintah. Sementara ekspor netto dapat membuat pertumbuhan PDRB menurun, karena ekspor Lampung cenderung menurun dengan nilai ekspor yang relatif kecil akibat dari ekspor yang mengandalkan bahan baku dan barang setengah jadi terutama ekspor hasil produksi pertanian, sedangkan pengeluaran untuk impor masih cukup tinggi, karena selama ini impor Lampung (Kajian Ekonomi Regional BI 2009) didominasi barang-barang berupa oil seeds, grain, seeds dan fruits dan barang-barang konsumtif lainnya.
- 2) Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung berdasarkan hasil analisis dapat meningkatkan pengangguran, hal ini dimungkinkan peningkatan PDRB kurang terarah pada peningkatan penyediaan lapangan kerja produktif.
- 3) Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung dapat meningkatkan kemiskinan, karena PDRB masih mencerminkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Disamping itu, ketidakmampuan PDRB dalam mengurangi kemiskinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah mengenai kenaikan secara berulang-ulang berbagai tarif dan harga selama kurun waktu 15 tahun terakhir, seperti; kenaikan Tarif Dasar Listrik, harga Gas dan tarif Air minum yang cenderung meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga mendorong meningkatnya

PDRB namun kemiskinan juga terus meningkat.

- 4) Untuk mengatasi pengangguran di Provinsi Lampung berdasarkan hasil analisis di perlukan peningkatan hasil produksi sektor primer khususnya sektor pertanian, karena Provinsi Lampung yang memiliki lahan pertanian yang luas (14,92 % dari luas wilayah Lampung, BPS 2007) secara nyata dapat meningkatkan kesempatan kerja, yang demikian pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran. Disamping sektor primer pengangguran dapat berkurang dengan peningkatan hasil produksi sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Bank dan lembaga keuangan serta sektor jasa-jasa), sektor-sektor tersebut cukup banyak memberikan lapangan kerja bagi pengangguran.
- 5) Untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung di perlukan upaya terpadu guna peningkatan produksi sektor primer khususnya sektor pertanian, karena pada sektor ini yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan potensi lahan pertanian yang subur akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja, dengan demikian akan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (mengurangi kemiskinan). Sementara sektor sekunder dan sektor tersier tidak dapat mengurangi kemiskinan dan bahkan sebaliknya dapat meningkatkan kemiskinan. Kenyataan ini dapat di pahami karena investasi untuk industri di sektor sekunder lebih banyak bersumber dari investasi yang berasal dari luar daerah Lampung, demikian hasilnya cenderung keluar daerah. Dengan demikian penduduk Lampung hanya dapat menikmati sebahagian kecil hasil investasi tersebut. Sektor tersier belum banyak mengurangi kemiskinan di Lampung sebagai dampak dari perkembangan sektor jasa masih belum berkembang baik pencerminan dari kurang baiknya infrastrukturnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini berhasil memperoleh model yang secara layak dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran agregat,

yaitu pertumbuhan konsumsi rumahtangga, investasi swasta, pengeluaran Pemerintah, ekspor netto terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, Selanjutnya pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Pertumbuhan PDRB sebahagian besar dipicu oleh adanya pertumbuhan pada investasi swasta, dan pertumbuhan pengeluaran Pemerintah, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara pertumbuhan ekspor netto justru pertumbuhannya dapat menurunkan PDRB. Ketidakmampuan ekspor netto dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB akibat dari ekspor Lampung yang nilai lebih rendah bila di dibandingkan dengan nilai impor, karena ekspor Lampung didominasi oleh hasil pertanian berupa bahan baku dan bahan setengah jadi. Sedangkan disisi lain impor Lampung nilainya cukup tinggi karena impor barang jadi dan berupa barang-barang konsumtif bukan merupakan impor bahan baku penolong, bahan baku olahan untuk industri untuk meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, namufaktur, pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan PDRB berdasarkan hasil analisis belum mampu menurunkan pengangguran dan kemiskinan bahkan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, ketidakmampuan ini di mungkinkan akibat dari adanya pertumbuhan PDRB yang kurang terarah pada peningkatan penyediaan lapangan kerja produktif dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bourguignon (2004), bahwa dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan hanya terjadi ketika ketimpangan relatif tinggi (*high inequality*). Disamping itu, ketidakmampuan PDRB dalam mengurangi kemiskinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah mengenai kenaikan secara berulang-ulang berbagai tarif dan harga selama kurun waktu 15 tahun terakhir, seperti; kenaikan Tarif Dasar Listrik, harga Gas dan tarif Air minum yang cenderung meningkatkan konsumsi rumahtangga sehingga mendorong meningkatnya PDRB namun kemiskinan juga terus meningkat.

Pertumbuhan PDRB sektor Primer terutama sektor pertanian dapat menurunkan pengangguran, karena sektor ini memberikan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja walaupun tidak secara langsung dapat menurunkan kemiskinan. Hal demikian terjadi karena sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja baik dari skill yang rendah sampai pada tenaga kerja yang memiliki skill tinggi.

Jumlah pengangguran dapat di kurangi dengan cara mening katnya nilai produksi sektor Tersier, seperti pertumbuhan jasa perdagangan, hotel dan resoran, jasa pengangkutan dan kominikasi serta jasa-jasa lainnya.

Sementara sektor sekunder dan sektor tersier tidak dapat mengurangi kemiskinan dan bahkan sebaliknya dapat meningkatkan kemiskinan. Kenyataan ini dapat di pahami karena investasi untuk industri di sektor sekunder lebih banyak bersumber dari inverstasi yang berasal dari luar daerah lampung, demikian hasilnya cenderung keluar daerah. Dengan demikian penduduk lampung haya dapat menikmati sebahagian kecil hasil investasi tersebut .

Sektor tersier belum banyak mengurangi kemiskinan di lampung sebagai dampak dari perkembangan sektor jasa masih belum berkembang baik pencerminan dari kurang baiknya infrastruktur.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Pengeluaran agregat; Konsumsi rumahtangga, investasi swasta, pengeluaran Pemerintah, ekspor netto secara keseluruhan (Simultan) pengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung.
- 2) Pengaruh pengaluaran agregat; konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap peningkatan/ pertumbuhan PDRB. Pertumbu han ekspor netto berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung. karena pertumbuhan ekspor netto dapat mengurangi pertumbuhan PDRB.

- 3). Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif (signifikan) terhadap pengangguran, yang berarti pengangguran di Provinsi Lampung tidak dapat dikurangi dengan cara meningkatkan pengeluaran agregat atau peningkatan PDRB.
- 4). Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan demikian untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB.
- 5). Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara simultan (keseluruhan variabel) berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran
- 6). Pertumbuhan PDRB sektor Primer dan sektor Tersier secara masing-masing (parsial) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya peningkatan produksi sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) dan sektor tersier (sektor perdagangan, pengangkutan, bank dan lembaga keuangan serta jasa-jasa lainnya) dapat mengurangi pengangguran. Sementara PDRB sektor Sekunder (sektor industri, listrik, gas dan air minum serta bangunan dan konstruksi) berpengaruh positif terhadap pengangguran, yang berarti pengangguran tidak dapat dikurangi dengan meningkatkan produksi sektor sekunder.
- 7). Pertumbuhan PDRB sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier secara simultan (bersama-sama) berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
- 8). Pertumbuhan PDRB sektor Primer secara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan sektor sekunder dan sektor Tersier berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya peningkatan produksi sektor primer dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung, sedangkan peningkatan sektor Sekunder dan sektor Tersier tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran-saran

yang dianggap relevan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Guna menambah ilmu pengetahuan khususnya perekonomian, pengangguran dan kemiskinan di provinsi lampung, maka disarankan kepada peneliti-peneliti lainnya di harapkan dapat memperluas cakupan penelitian yang terkait dengan Produk Domestik Regional Bruto, faktor-faktor penyebab pengangguran dan kemiskinan khusus di Provinsi Lampung termasuk memperluas wilayah cakupan penelitian.
2. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, disarankan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mengarahkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan antar variabel pengeluaran agregat, seperti konsumsi rumahtangga, investasi, pengeluaran Pemerintah. Terutama investasi swasta yang terarah pada penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan pengeluaran Pemerintah yang mengarah pada peningkatan pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan konsumsi rumahtangga.
3. Untuk mengurangi pengangguran di Provinsi Lampung peningkatan sektor pertanian baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, karena di provinsi ini pertanian dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Disamping itu diperlukan upaya yang sinergi antara pemerintah dan swasta guna mendorong peningkatan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
4. Untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata dan disadari pula bahwa telah banyak program penegasan kemiskinan yang di lakukan pemerintah, namun yang paling utama pembangunan dan peningkatan infrastruktur (Jalan, Pelabuhan, dan transportasi) agar mobilitas hasil produksi masyarakat dapat Lancar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan.
5. Berdasarkan hasil penelitian, di Provinsi Lampung diperlukan kebijaksanaan yang terpadu untuk peningkatan nilai Produksi

sektor Primer dan sektor Tersier secara serentak sangat di perlukan agar dapat memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja yang menganggur. Kebijakan tersebut diantaranya pembinaan terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peningkatan investasi pemerintah daerah khusus pada sektor pertanian dan pertambangan serta sektor jasa-jasa. Khusus untuk PDRB sektor Sekunder di perlukan regulasi yang memberikan kemudahan perizinan usaha dan pembinaan terhadap industri yang sudah ada untuk dapat mengembangkan berbagai industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, yang pada gilirannya akan mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah pada sektor tersebut, dengan demikian akan lebih banyak menyerap tenaga kerja yang semula menganggur.

6. Kebijakan serupa (poin 2) dapat dilakukan pula untuk mengurangi

DAFTAR PUSTAKA

Ajija, Shochrul. R, Dyah W. Sari, Rahmat H. Setianto, dan Martha R. Primanti., 2011. *Cara cerdas menguasai EVIEWS*, Salemba empat, Jakarta

Arief, Sritua., 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*. Lembaga Riset Pembangunan, Jakarta

Arsyad, Lincolin., 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Balisacan, A, E.M. Peritia, dan A. Asra., 2003. *Revisiting Growth and Poverty in Indonesia: What do Subnational Data Show*. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 39, Issue 3. December 2003.

Bourguignon, François. 2004. "The Poverty-Growth-Inequality Triangle." Paper presented at ICRIER, New Delhi, in Februari 2004.

Boediono., 1998. *Pengantar Ilmu Ekonomi, BPFE*. Yogyakarta.

Boediono., 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama. BPFE UGM, Yogyakarta.

Boediono., 2005. *Ekonomi Makro*. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.

Case, Karl e. and Fair, Ray C., 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. Edisi Kelima. Jakarta : PT, Indeks.

Chang, Ha-Joon (Editor)., 2003. *Rethinking*

kemiskinan terutama pada daerah pedesaan. Sementara untuk daerah perkotaan pemerintah Daerah Lampung diharapkan dapat menciptakan kebijaksanaan yang dapat mempermudah penyaluran

7. Kredit Usaha Kecil dan Menengah serta meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana tersebut oleh kelompok usaha kecil dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain kebijakan diatas, untuk mengurangi kemiskinan Pemerintah Daerah di harapkan mendorong dan memberikan peluang agar investasi lokal dan inverstasi
8. Pemerintah Daerah lebih di tingkatan perannya menggali potensi sumber daya alam di Lampung, Di sisi lain perbaikan infrastruktur sangat diperlukan
9. untuk mendorong peningkatan sektor jasa agar pendapatan penduduk Lampung dapat meningkat yang pada akhirnya kemiskinan dapat dikurangi.

Development Economics. Wimbledon Publishing Campany, London.

Chenery, Hollis., 1979, *Structural Change and Development Policy*, Oxford University Press.

Chenery, Hillis and T.N. Srinivasan, 1993, *Handbook of development Economic*, Handbooks in Economics 9 Elsaver Science Publishers B.V. Amsterdam, Netherland.

Chenery, H.B. and M. Syrquin. 1975. *Pattern of Development 1950-1970*. The World Bank, Washington D.C.

Daryanti, Arief dan Hafisrianda, Y., 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Konsepsi dan Aplikasi*. PT. Penerbit IPB Press, Bogor.

Deliarnov., 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Deny Tisna A., 2008, *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2003-2004*, Jurnal Ekonom, UNDIP Semarang

Dian Octaviani., 2001, *Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia, Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8

- Djojohadikusumo, Sumitro., 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Gujarati, Damodar N., 2003, *Basic Econometric*, International Edition, Fourth Edition, Mc. Graw Hill, New York
- Gujarati, Damodar N., 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*, The McGraw-Hill Companies Inc. All rights reserved. Bahasa Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Guilford, J.P., 1976. *Fundamental statistics in psychology and education* London ; McGraw-hill.
- Hady, hamdy., 2001. *Ekonomi Iniernasional. Teori dan Kebijakan Perdagangan Iniernasional*. Buku 1. Edisi Revisi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul., 2005. *Analisis Investasi*. Edisi Kedua dan empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Hamoraon, Haroni Doli., 2005. *Analisis Kausalitas Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Sekolah Pascasarjana USU. Medan.
- Hermanto, S dan Dwi W., 2006, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesian: Proses Pemerataan da Pemiskinan*, Direktur Kajian Ekonomoi, Institut Pertanian Bogor
- Husnan, Suad., 1998. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Hayami, Yujiro., 2001, *Development Economics Form The Proverty to the Wealth of Nations*. Second Edition. Oxford University Press.
- Irawan dan Suparmoko, M., 1992. *Ekonomi Pembangunan*. disi ke 5 BPFE UGM, Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmoko, M., 2002. *Ekonomi Pembangunan*, disi ke 6, BPFE. Yogyakarta
- Jhingan M.L., 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Jung dan marshall., 1985. *The Process of Industrial Development and Alternative Development Strategies*. Princeton University Press, Princeton, N.J.
- Kim, J. Dan L. Lau., 2004, *The Sources of Economic Growth*. Canadian, Journal of Economics , Special Issue. Part 2., D., C, The Wold Bank.
- Koutsoyiannis., 1977. *Theory of Econometrics : An Introductory Exposition Econometric Methods*, Second Edition. The Macmillan Press Ltd., United Kingdom
- Lee, Jennifer., March 2005. *Financial Intermediation and Economic Growth Evidence from Canada*. Eastern Economic Association, New York, http://www.fordham.edu/i_wth.pdf
- Lihan, Irham dan Yogi., 2003. *Analisis Perkembangan Ekspor dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Ekonomi & Bisnis* No. 1, Jilid 8.
- Marsuki., 2005. *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Meier, Gerald M., 1995. *Leading Issues In Economic Development*. New York : Sixth Edition. Oxford University Press.
- Miles, David and Andrew Scott., 2005. *Macroeconomics*, Understanding the Wealth of Nations. John Wiley and Sons, inc, Chichester, England.
- Mulyawan, Rahman., 2002. *Administrasi Keuangan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- N. Gregory Mankiw., 2006. *Principles of Economics*, terjemahan Criswan Sungkono. Salemba empat. Jakarta.
- Nafziger E. Wayne., 1994, *The Economics of Developing Countries*, Kansas State University Press
- Pabozzi, Frank J., 1999. *Manajemen Investasi*. Alih Bahasa : Tim Penerjemah Salemba Empat. Jakarta : Penerbit Salemba Empat dan Simon and Schuster (Asia) Pte.Ltd. Prentice Hah.
- Purbadhamiaja, Ida Bagus Putu., 2006. *Implikasi Variabel Peugeluaran Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali*, *Buletin Studi Ekonomi* Volume 11 Noinor 1 Tahun 2006.
- Riduwan., 2002. *Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sanusi, Bachrowi., 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Samuelson, Paul. A. and Nordhaus., 2004, *Makroekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Sen, Amartya., 1999. *Employment Technology, and Development*, Indian ed. Oxford University Press, New Delhi.
- Sekaran, Uma., 2006. *Metodologi Penelitian*

- Unluk Bisnis (Research Methods For Business)*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Siagian, H., 1992. *Pembangunan Ekonomi dalam cita-cita dan Realisasi*. Alumni, Bandung
- Siregar, H., 2006. *Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja*, Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan, INDEF, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Sofiyani Efendi (Editor), 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Siegel., 1996. *Statistik Nonparametrik: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Terjemahan. Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono., 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sukwika, T., 2003. *Analisis Pasar Tenaga Kerja dan Migrasi di Kabupaten Bogor*, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sukirno, Sadono., 1998. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- ., 2000, *Pengantar teori Makro ekonomi*, Cetakan 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ., 2002, *Pengantar teori Makro ekonomi*, Cetakan 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ., 2004., *Makro Ekonomi Teori dan Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- ., 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- ., 2004. *Pengantar Bisnis*. Edisi Pertama. Jakarta Kencana.
- Suliyanto., 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. ANDI: Yogyakarta
- Suryana., 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Suryahadi, A., D. Suryadarma. dan A. Sumarto., 2006. *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Pectoral Components of Growth*. SMERU Working Paper, August 2006.
- Suryadarma, D. dan A. Suryahadi., 2007. *The Impact of Private Growth Sector on Poverty Reduction: Evidence from Indonesia*. SMERU Working Paper, April 2007.
- Soule, George., 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka. Dari Aristoteles hingga Keynes*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus ., 2001. *Perekonomian Indonesia (Beberapa Isu Penting)*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ., 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*.Pustaka Quantum. Jakarta.
- ., 2000. *Perdagangan Intemasional dan Neraca Pembayaran. Teori dan Temuan Empiris*. LP3ES. Jakarta.
- .,*Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung*, Bank Indonesia, Triwulan IV.2002
- ., 2009. *Analisis dan Kajian Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung*. Katalog BPS : 3102009.18, BPS Provinsi Lampung.
- ., 2009. *Lampung Dalam Angka*. Katalog BPS 1102001.18. BPS Propinsi Lampung.
- Todaro, P. Michael., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Alih Bahasa : Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Wahyu Winarno, Wing., 2007. *Analisis Ekonometrika dan statistika dengan Eviews*. YKPN, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus., 2009. *Ekonomterika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi ke Tiga. Ekonisia: Yogyakarta.
- Wirasmita, Yuyun., 2010, *Ekonomi Makro*, Jakarta
- Wirasmita, Yuyun., 2008. *Uji Kelayakan Model*. Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Bandung
- World Bank., 2007. *Spending for Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities - Indonesia Public Expenditure Review 2007*. The World Bank Office, Jakarta.
- Yamin, Sofyan. Lien A. Rachmach. Kurniawan, Heri., 2011. *Regresi dan korelasi dalam genggaman anda*. Salemba empat. Jakarta.